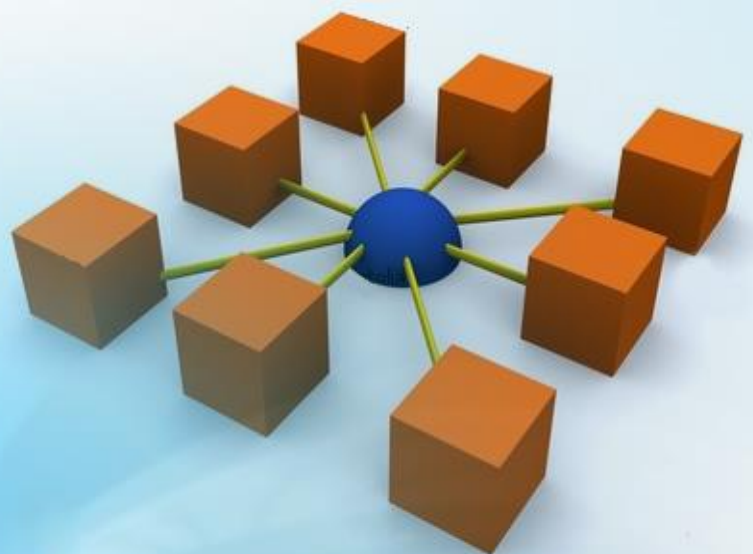




LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Firdaus H. Rais No.63 Singkawang 79123
Telp. (0562) 639472 Fax. (0562) 639472**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ini merupakan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan kinerja tahun 2022 yang terwujud dalam program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Renstra Perubahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan internal maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal.

Singkawang, Januari 2023

KERAJA DINAS

SUTIKARTO, S.ST,M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660514 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur	29
5. Sumber Daya Keuangan	30
6. Sarana dan Prasarana	30
B. PERMASALAHAN UTAMA	33
1. Permasalahan Urusan di Sosial	34
2. Permasalahan Urusan di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35
3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
A. RENSTRA.....	37
1. Visi	37
2. Misi	38
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta	
4. Indikator Kinerja Utama	39
B. PERJANJIAN KINERJA	41

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	45
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	47
1.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun 2022	48
2.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu	
3.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Indikator Tujuan Renstra	58
4.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional	60
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	62
B.	REALISASI ANGGARAN	66
BAB IV	PENUTUP	68
A.	KESIMPULAN	68
B.	RENCANA TINDAK LANJUT	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	29
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	29
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021	30
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022	40
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 - 2022	40
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	42
Tabel 2.4	Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun . 2022	42
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Ordinal	46
Tabel 3.3	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang	47
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2023	44
Tabel 3.5	Analisis Atas Efisiensi	51
Tabel 3.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian	

Pernyataan Kinerja	53
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 s.d Tahun 2022	57
Tabel 3.8 Realisasi Kinerja 2020-2023 dan target RPJMD	58
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	60
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022	28
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang serta Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 061/487/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi Dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial, Lanjut Usia dan Anak;
 - b) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Kelompok Sub-substansi Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Sub-substansi Penanganan Kemiskinan;
 - 2) Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial; dan
 - 3) Kelompok Sub-substansi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 2) Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Singkawang, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 3) pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- 4) penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- 6) penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 8) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- 10) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset memiliki tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;

- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
- e) melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan, bahan/material;
- f) melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan budaya kerja;
- h) melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
- i) melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
- j) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan

- k) Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN);
- l) melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- m) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- n) melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat;
- o) melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- p) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
- q) melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak

dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;

- r) menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- s) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
- t) melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
- u) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;

- e) melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- f) melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
- g) melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- h) melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, standar pelayanan minimal, proses bisnis dan *risk management*;
- i) melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
- j) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan serta mengkoordinasikan pengolahan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- k) melaksanakan administrasi pendapatan daerah meliputi perencanaan pengelolaan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi

daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, pelaporan pengelolaan retribusi daerah, pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah serta penetapan wajib retribusi Daerah;

- l) menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
- n) melaporkan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan kepada Sekretaris; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial;

- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak, rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan sosial; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1) Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak;
- e) melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak jalanan, anak nakal, penyandang disabilitas,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, lanjut usia korban kekerasan, lanjut usia potensial dan lanjut usia non potensial;

- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak jalanan, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual;
- g) menyusun konsep naskah dinas bidang rehabilitasi sosial lansia dan anak;
- h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak yang telah dilaksanakan; dan
- i) melaporkan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak

2) Kelompok Sub-subtansi Rehabilitasi Sosial PMKS

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial PMKS;
- e) melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial berupa penyediaan kebutuhan pokok, alat bantu, pemberian layanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian pelayanan penulusuran keluarga, pemberian layanan rujukan, dan kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, gelandangan, pengemis, bekas warga

binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial eks tuna susila serta rehabilitasi WNI migran bermasalah sosial;

- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial eks tuna susila serta rehabilitasi WNI migran bermasalah sosial;
- g) melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- h) melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- i) menyusun konsep naskah dinas bidang rehabilitasi sosial PMKS;
- j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS yang telah dilaksanakan; dan
- k) melaporkan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial PMKS kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

3) Kelompok Sub-subtansi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e) melaksanakan penanganan korban bencana alam, pemulihan, pemberian santunan dan penguatan sosial serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f) melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan bagi korban bencana alam dan bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g) melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- h) melaksanakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i) melaksanakan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga, melaksanakan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j) melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana serta pembinaan pencegahan bencana kepada masyarakat;
- k) melaksanakan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- l) menyusun konsep naskah dinas bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang telah dilaksanakan; dan
- n) melaporkan kegiatan bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

3.4 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan

mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan meliputi penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;

- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan membawahi :

1) Kelompok Sub-substansi Penanganan Kemiskinan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan

- dan petunjuk teknis bidang penanganan kemiskinan;
- e) melakukan pendataan kemiskinan cakupan Daerah untuk penetapan data kemiskinan setiap periode dan penentuan sasaran penerima bantuan sosial serta alokasi anggaran;
 - f) melakukan pengelolaan pendataan kemiskinan cakupan Daerah untuk dasar pemutakhiran dan perbaikan data hasil pendataan, verifikasi dan validasi data;
 - g) melakukan pemberian bantuan dan pemberdayaan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan;
 - h) melakukan pengelolaan sistem informasi data kemiskinan sebagai dasar pemberian bantuan sosial;
 - i) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap penanganan kemiskinan untuk penguatan kapasitas tenaga pelaksana program kemiskinan serta untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan kemiskinan;
 - j) menyusun konsep naskah dinas bidang penanganan kemiskinan;
 - k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan yang telah dilaksanakan; dan
 - l) melaporkan kegiatan bidang Penanganan Kemiskinan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

2) Kelompok Sub-subtansi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sosial;
- f) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- g) melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah meliputi: rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan pengamanan taman makam pahlawan;
- h) melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan lembaga;

- i) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat meliputi fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayaguna, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan;
- j) menerbitkan izin pengumpulan sumbangan dan rekomendasi UGB (Undian Gratis Berhadiah);
- k) menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan sosial;
- l) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial yang telah dilaksanakan; dan
- m) melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan.

3.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 4) pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1) Kelompok Sub-subtansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- e) melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termaksud PPPRG;
- f) melaksanakan penyiapan pelembagaan PUG, penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- g) melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga serta dibidang perlindungan perempuan;

- h) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i) melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j) menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang telah dilaksanakan; dan
- l) melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Kelompok Sub-subtansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- b) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- c) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- d) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
- e) melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f) melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

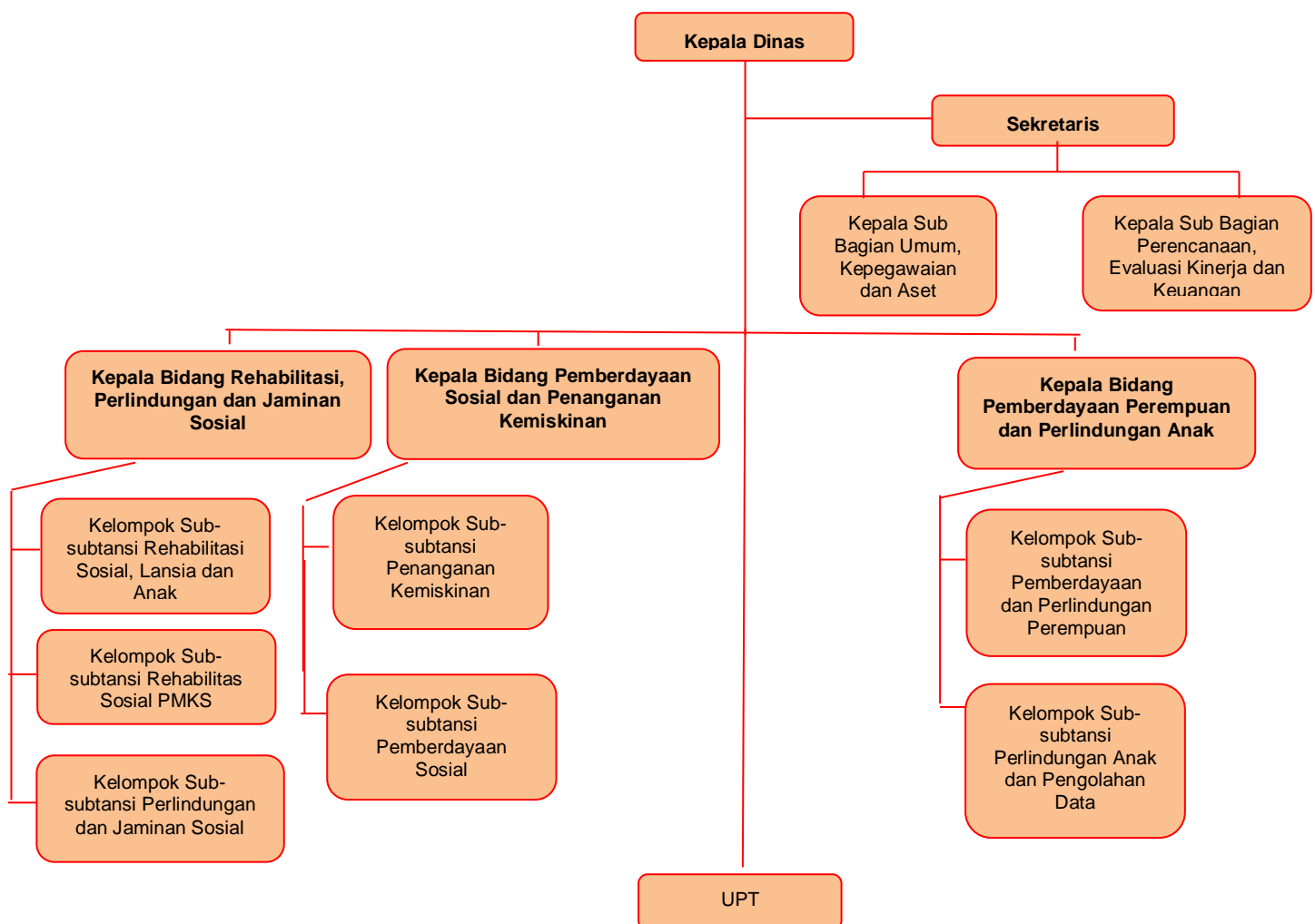
- g) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak;
- h) melaksanakan penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
- i) melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j) menyusun konsep naskah dinas di bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
- k) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

3.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Singkawang Tahun 2022



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	4	-	9
3	Bidang RPJS	1	3	1	-	5
4	Bidang PM	1	5	-	-	6
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-	4
Jumlah		5	15	4	-	25

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	2	2	-	-	3	1	-	9
3	Bidang RPJS	1	3	-	-	-	1	-	-	5
4	Bidang PM	1	4	-	-	-	1	-	-	6
5	Bidang PP & PA	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Jumlah		5	12	2	-	-	5	1	-	25

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022 mendapat alokasi dana dari APBD Kota Singkawang sebesar Rp. 3.838.106.907 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.357.684.655,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.836.699.010,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.520.985.645,-

6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
INTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	3	554.746.755,41	
		1.3.1.01.	Tanah	3	554.746.755,41	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	293	1.334.323.342,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	11	497.801.242,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	208	480.330.850,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	9	43.225.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	57	312.966.250,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3	165.450.210,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(1.137.134.998,25)	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(1.596.334.400,10)	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	(109.748.775,00)	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	204.991.500	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	(204.991.500)	
TOTAL				305	3.874.252.036,06	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
EXTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	0	0,00	
		1.3.1.01.	Tanah	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	340	124.557.750,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	327	123.207.750,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	10	1.350.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	3	0,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	385.000,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	0	0,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	385.000,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
TOTAL				341	124.942.750,00	

B. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan di Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang semakin meningkat merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
2. Belum tersedianya data PMKS yang lengkap dan akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat;
3. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu serta PSKS belum berperan secara optimal;
4. Terkait teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal seperti terdapat PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang, sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
5. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta belum adanya penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan saat ini masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain :

1. Dalam pengentrian program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Aplikasi SIPD mengalami masalah (tidak bisa dientri Program Kegiatannya), hal tersebut sudah dikoordinasi dengan leading sektor terkait dan terkait dengan aturan urusan pemberdayaan masyarakat yang masih dalam proses.
2. Program kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat tetap dilaksanakan meskipun tanpa menggunakan anggaran APBD (fasilitasi tempat kegiatan propinsi yang dilaksanakan di Singkawang).
3. Keterbatasan sumber pendanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada urusan tersebut;
4. Diperlukan peningkatan kapasitas ASN dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Kurangnya partisipasi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Mengingat minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi;
2. Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
3. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
4. Masih minimnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien.
5. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum, sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;
6. Penanganan terhadap anak bermasalah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Visi Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2018-2022 merupakan implementasi dari janji-janji politik yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Hal ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penyusunan RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2018-2022 menetapkan Visinya yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**.

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis sebagai berikut :

- a. **H**armonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **A**dil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

2. Misi

Misi dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Singkawang pada akhir tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya di akhir masa jabatan itulah dapat diketahui dan diukur keberhasilan walikota dalam memimpin Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPJMD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Dari paparan serta uraian Tujuan Misi kepala daerah maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 5 (lima) tahun kedepan (2018-2022) melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi Pemerintah Kota Singkawang, yaitu misi kedua "*Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri*" dengan tujuannya yaitu

“Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi” dan dengan rumusan sasarannya yaitu *“Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan”*.

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022

RPJMD KOTA SINGKAWANG				RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
VISI	MISI KE-2	TUJUAN	SASARAN KE-3	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Singkawang HEBAT 2022	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 – 2022

SASARAN STRATEGIS	I K U	KONDISI AWAL	TARGET SASARAN / TAHUN					KONDISI AKHIR
			2018	2019	2020	2021	2022	
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	65,34	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	70,00
2. Meningkatkan Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	8,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	17,00
3. Meningkatkan Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	135	400	500	550	600	650	650

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Pada Perjanjian Kinerja harus terdapat indikator kinerja, karena indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang untuk masa jabatan tahun 2017-2022.

Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja 2022 antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan Wali Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	70,00
		2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	17,00
		3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	650
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
		4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4. - Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB BB

Tabel 2.4
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

NO	SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I.	Menurunnya Jumlah PMKS	Rp. 737.096.867,00	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 68.583.800,00	APBD
	- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	68.583.800,00	
	- Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.000.000,00	
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	50.583.800	
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 6.945.000,00	APBD
	- Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6.945.000,00	

	- Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6.945.000,00	
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 385.121.267,00	APBD
	- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	142.613.267,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	142.513.267,00	
	- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	242.508.000,00	
	- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	9.804.000,00	
	- Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	232.704.000,00	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 154.240.600,00	APBD
	- Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	14.300.000,00	
	- Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	14.300.000,00	
	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	22.720.000,00	
	- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	22.720.000,00	
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	54.926.600,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22.720.000,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.500.000,00	
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 94.337.200,00	APBD
	- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	61.066.200,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	49.066.200,00	
	- Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	12.000.000,00	
	- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	33.371.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	33.271.000,00	
6	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 27.869.000,00	APBD
	- Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.869.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.869.000,00	
II.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Rp. 39.479.500,00	
1.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.479.500,00	APBD
	- Kegiatan Pemberdayaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.479.500,00	
	- Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	39.479.500,00	
III.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Rp. 122.645.500,00	
1.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 88.705.500,00	APBD
	- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.705.500,00	
	- Sub Kegiatan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.825.500,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	23.880.000,00	

2.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	33.940.000,00	APBD
	- Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		33.940.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		33.940.000,00	
IV.	Penunjang Urusan Lainnya	Rp.	3.458.462.788,00	
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	3.401.344.790,00	APBD
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.549.200,00	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.168.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.775.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.990.800,00	
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.614.400,00	
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.857.262.110,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.730.019.010,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		122.280.000,00	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.963.100,00	
	- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		2.978.000,00	
	- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.978.000,00	
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		182.205.975,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.511.875,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		51.001.300,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		9.998.600,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		3.175.200,00	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		108.519.000,00	
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		258.139.605,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		93.217.785	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		164.921.820,00	
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84.210.000,00	
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		47.840.000,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		24.120.000,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12.250.000,00	
2	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	57.117.998,00	APBD
	- Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		57.117.998,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		57.117.998,00	
JUMLAH		Rp.	4.357.684.655,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau gap. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja,

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Berikut ini merupakan skala nilai peringkat kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala nilai Peringkat kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Berikut ini merupakan pengukuran kategori capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan kategori capaian SAKIP perangkat daerah disimpulkan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$X > 90$	Sangat Memuaskan (AA)
2	$X > 80$	Memuaskan (A)
3	$X > 70$	Sangat Baik (BB)
4	$X > 60$	Baik (B)
5	$X > 50$	Cukup (CC)
6	$X > 30$	Kurang (C)

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Singkawang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	1. Menurunnya Jumlah PMKS	Presentase Penanganan PMKS
		2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan pada Sektor Ekonomi	Presentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi
		3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)
		4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang perlu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berikut capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja digambarkan sebagaimana tebal dibawah ini :

I. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022.

Untuk melihat target dan realisasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA					
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	70,00	96,17%	137%	Sangat tinggi
2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	17,00	10,58%	62,23%	Rendah
3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	650	681,05	105%	Sangat tinggi
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG					
4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4. Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Sangat Baik 70	CC Cukup 56,48	80,69%	memuaskan
	Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB Sangat Baik 70	B Baik 60,90	87,00%	memuaskan
Rata-rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja				94,38	

Penjelasan :

- Sasaran Menurunnya Jumlah PMKS dengan indikator Persentase Penanganan PMKS diperoleh dari nilai realisasi 96,17% jika dibanding dengan target 70,00% Hal ini diperoleh dari Formulasi Jumlah PMKS yang tertangani 70.927 jiwa dibagi Jumlah PMKS di Kota Singkawang 73.748 jiwa dan dapat dikatagorikan **“Sangat Tinggi”** atau capaian kinerja 137%.
- Sasaran Meningkatnya Kompetensi Perempuan pada Sektor Ekonomi dengan indikator persentase perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi diperoleh dari nilai realisasi 10,58% jika dibandingkan dengan target 17,00% maka capaian kinerja sebesar 62,23 hal ini diperoleh dari jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaaan ekonomi sebanyak 530 orang dibagi dengan jumlah perempuan rentan di kota Singkawang 5.010. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dikatagorikan **“Rendah”** dengan capaian indikator sasaran sebesar 62,23%.
- Sasaran Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) dengan indikator Skor Penilaian Pemenuhan 24 Indikator KLA yang bergerak dari 0-1000 jika dibandingkan dengan target 650. Hal ini diperoleh berdasarkan penilaian mandiri indikator kota layak anak Berbasis Web yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan hasil skor penilaian kota layak anak Kota Singkawang sebesar 681,55 dan di

katagorikan “**Sangat Tinggi**” dengan tingkat capaian 104,85%.

Dimana untuk kategori capaian reformasi birokrasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 mendapat kategori (CC) dengan nilai 56,48% dibanding dengan target kota (BB) atau 70% sehingga di katagorikan “**Baik**” dengan tingkat capaian kinerja **80.69%**.

- Untuk katagori capaian SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat kategori (B) adalah nilai yang diambil dari tahun 2021 dengan nilai 60,90% dibanding dengan target kota (BB) atau 70% sehingga diperoleh capaian kinerja di katagorikan “**Memuaskan**” dengan capaian kinerja SAKIP sebesar **87.00%**.
- Kesimpulan, hasil capaian kinerja rata-rata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 adalah “**Sangat Tinggi**” dengan rata-rata capaian kinerja **94,38%**.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	68.583.800	31.186.783	47,55	137%	
		Program penanganan Warga negara migran Korban tindak Kekerasan	6.945.000	6.945.000	100		
		Program Rehabilitasi Sosial	385.121.267	384.606.945	99,86		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	154.240.600	154.238.400	99,99		
		Program Penanganan Bencana	94.337.200	94.307.550	99,96		
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.479.500	38.670.000	97,94	62,23%	
		Program Perlindungan Perempuan	27.869.000	11.888.000	42,65		
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan Hak Anak	88.705.500	76.466.461	86,20	105%	
		Program Perlindungan Khusus Anak	33.940.000	20.120.000	59,28		
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG							
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	3.401.344.790	3.248.352.361	95,50	80,69%	
						87,00%	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	57.117.998	56.923.500	99,67		
					84,41	94,38	9,97

Penjelasan :

- Apabila dibandingkan antara rata persentase realisasi anggaran sebesar 84,41% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 94,38%. maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya belum optimal dikarenakan tingkat capaian kinerjanya belum mencapai 100% (capaian kinerja < 100%). Namun diketahui tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022 adalah 9,97% (persentase Realisasi Anggaran 84,41 dikurang persentase capaian kinerja 94,38), ini menunjukkan pencapaian target output yang telah ditetapkan melebihi realisasi anggaran.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis tahun 2022 mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2018-2022. Sasaran strategis “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan” yang kemudian ditetapkan menjadi indikator utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

Dari 4 (Empat) sasaran strategis dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang melebihi target kinerja, dikategorikan sangat tinggi yaitu menurunnya Jumlah PMKS dengan nilai capaian kinerja 137% dan Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA) dengan nilai capaian kinerja 105%. Hal ini disebabkan karena telah melakukan evaluasi dalam peningkatan kinerja.

2. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang hampir mencapai target dikategorikan tinggi yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan nilai capaian 80,69% dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai capaian kinerja 87,00%. Hal ini disebabkan karena kurang lengkapnya dokumen/laporan terhadap komponen penilaian.
3. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang dikategorikan rendah yaitu Meningkatnya Kompetensi Perempuan pada Sektor Ekonomi dengan capaian kinerja 62.23%. Hal ini disebabkan Keterbatasan anggaran untuk memberikan pelatihan/ sosialisasi/ bimbingan terhadap Perempuan Rentan di Kota Singkawang.

Berikut ini dapat diuraikan program kegiatan pada tahun 2022 yang dituangkan didalam tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	68.583.800	31.186.783	45,47	
	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000	100	Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka memfasilitasi para TKSK (5 TKSK) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.583.800	13.186.783	26,06	Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka penanganan Stunting di Kota Singkawang
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6.945.000	6.945.000	100	

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6.945.000	6.945.000	100	Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelayanan terhadap 7 warga migran terlantar dan 3 orang warga migran meninggal dunia.
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	385.121.267	384.606.945	99,86	
	- Penyediaan Permakanan	142.613.267	142.575.000	99,97	Kegiatan ini berupa kunjungan kerumah warga dalam pemberian paket sembako yang dianggarkan selama 6 bulan untuk diberikan kepada orang dengan distabilitas berat 20 orang, lanjut usia tidak berdaya 25 orang, gelandangan dan pengemis di luar panti 20 orang, anak-anak berkebutuhan khusus 10 orang
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	242.508.000	242.031.945	99,80	
	- Pemberian Layanan Rujukan	9.804.000	9.804.000	100	Kegiatan ini merupakan penanganan 8 kasus yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dalam shelter
	- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	232.704,000	232.227.945	99,79	Kegiatan ini merupakan pelayanan rehabilitas sosial bagi Disabilitas Mental terhadap 45 orang eks pasien rumah sakit jiwa bagak sahwa
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	14.300.000	14.300.000	100	
	- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	14.300.000	14.300.000	100	Kegiatan ini untuk penanganan kasus ABH bagi anak-anak terlantar sebanyak 25 kasus
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	139.940.600	139.938.400	99,99	

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Daerah Kabupaten/Kota				
	- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	57.794.000	57.792.400	99,99	Kegiatan ini melaksanakan validasi dan verifikasi penerima bantuan iuran PBI.
	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	54.926.600	54.926.000	100	Kegiatan ini merupakan validasi si dan verifikasi data kemiskinan
	- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	22.720.000	22.720.000	100	Kegiatan ini merupakan pendampingan dari 25 orang PKH yang merupakan kegiatan program keluarga harapan (PKH) bantuan dari kementerian RI dalam memberikan Pelayanan dan KPM PKH yang mengikuti fasilitasi FDS.
	-Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.500.000	4.500.000	100	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penangan peningkatan ekonomi melalui KUBE bagi fakir miskin dan tidak mampu sebanyak 10 KUBE
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.337.200	94.307.550	99,99	
	-Penyediaan Makanan	49.066.200	49.001.550	99,86	Kegiatan ini dilaksanakan untuk penanganan bencana alam dan bencana sosial terhadap korban bencana dan paska bencana yang menerima bantuan tanggap darurat terlayani sebanyak 151 KK 571 jiwa.
	- Penanganan khusus Bagi Kelompok Rentan	12.000.000	12.000.000	100	Kegiatan ini penanganan astisensi perlindungan dan jaminan sosial bagi orang fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlantarkan berat sebanyak 10 KK fakir miskin
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	33.271.000	33.246.000	99,92	

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	33.271.000	33.246.000	99,92	Kegiatan ini merupakan pelaksanaan penanganan tangkap darurat dan peningkatan kapasitas tagana sebanyak 28 orang tagana
PROGRAM PENGARUSTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	39.478.500	38.670.000	97,95	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	39.478.500	38.670.000	97,95	Kegiatan ini merupakan kegiatan pengarustamaan gender yang melibatkan pengurus organisasi perempuan sebanyak 250 orang.
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	27.869.000	11.888.000	42,65	
	-Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	27.869.000	11.888.000	42,65	Kegiatan ini untuk pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan/ Integrasi sosial sebanyak 10 orang
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan kewenangan Kabupaten/ Kota	88.705.500	76.466.461	86,20	
	- Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.825.500	56.986.461	87,90	Kegiatan ini untuk pemilihan pengurus inti dan partisipasi dalam forum anak daerah sebanyak 100 orang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	23.880.000	19.480.000	81,57	Kegiatan ini merupakan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah untuk peningkatan dalam pelaksanaan penilaian Kota Layak Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSU ANAK	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	33.940.000	20.120.000	59,28	

Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	33.940.000	20.120.000	58,28	Kegiatan ini merupakan perlindungan khusus terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan koomperhensip sebanyak 36 kasus

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET					REALISASI					CAPAIAN KINERJA				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
INDIKATOR KINERJA UTAMA																
1. Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS (%)	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	64,86	67,95	69,94	70,19	96,17	98,28	101,42	102,85	101,73	137%
2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	8,00	12,16	7,19	8,06	10,58	88,88	110,55	55,31	53,76	62,23
3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	400	500	550	600	650	135	556,90	0,00 (tidak ada penilaian)	533,75	681,05	33,75	111,38	0	88,96	105
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG																
4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	BB 70	BB 70	n/a	n/a	CC 53,59	B 66,34	CC 56,48	n/a	n/a	76,55	94,77	80,69
	- Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	BB 70	BB 70	n/a	n/a	A 84,01	A 80,71	B 60,90	n/a	n/a	120	115	87,00
Rata-Rata Realisasi Capaian Kinerja												73,64	107,78	70,94	90,84	94,38

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN INDIKATOR TUJUAN RENSTRA

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja 2020-2022 dan Target RPJMD

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			Target 2022
			2020	2021	2022	
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS (%)	69,94	70,19	96,17	70,00
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	7,19	8,06	10,58	17,00
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	0,00 (tidak ada penilaian,)	533,75	681,05	650
4.	Sasaran ke-3 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,53	4,83	4,67	4,60
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC 53,59	B 66,34	CC 56,48	BB 70
		Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A 84,01	A 80,71	B 60,90	BB 70

Penjelasan :

- Persentase Penanganan PMKS tahun 2020 sebesar 69,94 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 70,19 artinya ada kenaikan sebesar 0,25. Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 96,17 artinya ada kenaikan sebesar 25,98 dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi tahun 2020 sebesar 7,19 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,06 artinya ada kenaikan sebesar 0,87, sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 10,58 artinya ada kenaikan sebesar 2,52.
- Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2020 tidak dilakukan penilaian karena adanya surat dari KemenPPPA Nomor B. 566/KPPPA/D.IV/Sesdep/06/2020 Hal Evaluasi KLA Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2020 ditiadakan. Di tahun 2021 memperoleh skor sebesar 533,75, sedangkan di tahun 2022 memperoleh skor sebesar 681,05 artinya ada kenaikan sebesar 147,30 dibanding tahun sebelumnya.
- Untuk Indikator Kinreja Angka Kemiskinan di tahun 2020 sebesar 4,53, jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,83 artinya ada kenaikan sebesar 0,30, sedangkan di tahun 2022 sebesar 4,67 artinya ada kenaikan sebesar 0,16 dibanding tahun sebelumnya.
- Untuk Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2020 mendapat nilai CC jika dibandingkan di tahun 2021 mendapat nilai B artinya ada kenaikan. Sedangkan tahun 2022 mendapat nilai CC artinya ada penurunan nilai, hal ini dikarenakan kurang lengkapnya dokumen yang disampaikan pada saat penilaian.
- Untuk Katagori Capaian SAKIP Perangkat daerah tahun 2020 mendapat nilai A dan di tahun 2021 mendapat nilai A, sedangkan

tahun 2022 mendapat nilai B artinya ada penurunan nilai, hal ini dikarenakan kurang lengkapnya laporan pendukung yang disampaikan pada saat inspektorat melakukan evaluasi.

4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja 2020-2022 dan Target RPJMD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI 2022	TARGET NASIONAL	KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
1. Menurunnya Jumlah PMKS	1. Persentase Penanganan PMKS (%)	96,17%	100	Target Nasional yang diukur berdasarkan Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial
2. Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	2. Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (%)	10,58%	nihil	Target Nasional tidak ada
3. Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	3. Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	681,05	1.000	Target Nasional sesuai KemenPPPA No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan pengembangan Kab/Kota Layak Anak
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC 56,48	-	Realisasi PMPRB tahun 2022
	- Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B 60,90	-	Pada Realisasi SAKIP tahun 2022 merupakan penilaian Sakip Tahun 2021
Rata-rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja				

Penjelasan :

1. untuk indikator kinerja utama Persentase Penanganan PMKS (%) jika diukur berdasarkan Permensos 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, berikut perbandingan yang dikur

berdasarkan SPM Bidang Sosial melalui Aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	BELUM TUNTAS			47.94 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				17.23 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	6.56 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	866	71	795	8.20 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.67 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	53.33 %	
	1. Layanan data dan pengaduan	18	18	0	100.00 %	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti.	1	0			

Sumber data : Aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id

Penjelasannya :

1. Indikator Persentase Penanganan PMKS dengan realisasi 96,17% ini merupakan penanganan PMKS yang terdiri dari 26 jenis.

Namun dalam SPM Urusan Bidang Sosial untuk penanganan PMKS meliputi Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Pengemis dan Gelandangan di Luar Panti dan Korban Bencana. Di dalam komponen tersebut dalam SPM target nasional sebesar 100%, namun dalam capaian kinerja hanya 47,94% atau **“Sangat Rendah”**.

2. Dari indikator Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dengan realisasi sebesar 10,58% tidak ada target Nasional.
3. Dari Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA) untuk tahun 2022 terealisasi sebesar 681,05 dibandingkan dengan target nasional sebesar 1000 artinya KLA Kota Singkawang masih belum mencapai target nasional yang telah ditentukan.

Skor Total	2017 (Final)		2018 (Final)		2019 (Final)		2020 (Final)	2021 (Final)		2022 (Final)		KETERANGAN
Kelembagaan	135	1000	398.4	1000	556.9	1000	1000	533.8	1000	681.05	1000	Sudah ada perda perlindungan perempuan dan anak serta SK Gugus Tugas KLA
Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan	48	150	55	150	74	100	100	80	100	116.5	150	Konsistensi partisipasi anak dalam musrenbang kecamatan, Akte Kelahiran dan KIA dan Informasi layak anak baik dari Kominfo dan Perpustakaan
Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	56	140	64	135	75.5	125	125	93.5	125	80	115	PAUD HI masih rendah, tahun 2021 sudah di bentuk, Panti Asuhan sudah diakreditasi, Ruang terbuka ramah anak belum distandarisasi
Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	31	175	65.5	205	88.75	180	180	64.25	180	142	115	Sudah ada perwako KTR, Tahun 2020 Kegiatan Kesehatan fokus pada penanganan covid 19
Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	0	195	77.5	185	80.2	150	150	59.3	150	112	170	Terdapat 21 SRA, tahun 2021 bertambah 1 sekolah mengajukan diri sebagai kila
Klaster 5 : Perlindungan Khusus	0	135	47.5	110	84.5	130	130	72	130	58	150	Terbatasnya fasilitas rujukan penanganan AMPK dan masih adanya kecenderungan penanganan AMPK secara parsial
Kelana/Dakela : Kecamatan /Desa/Kelurahan Layak Anak	0	205	88.85	215	103.8	215	215	106.1	215	133.25	205	Skor masih rendah pada Dakela, KLA baru menyentuh Kecamatan

Sumber data : penilaian mandiri indikator kota layak anak Berbasis Web yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Keberhasilan capaian kinerja program kegiatan harus didukung dengan kesiapan perencanaan yang matang dengan data-data yang dimiliki, kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan paham akan persoalan yang terjadi, dukungan sarana dan prasarana, jejaring kerja antara pihak dinas, pemerintah dengan mitra-mitra kerja sebagai perpanjangan tangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dilapangan serta didukung kemampuan anggaran dan komitmen pemangku kebijakan di daerah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika hal tersebut tersedia maka profesionalisme dalam memberikan pelayanan akan lebih baik dan masyarakat semakin maju dan sejahtera.

a. Hambatan dan kendala dalam Pencapaian Sasaran, antara lain :

- ✚ Permasalahann PPKS semakin meningkat dan kompleks, sehingga perlu penanganan yang komperhensif dan terpadu berbagai pihak yang berkecimpung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ✚ Belum semua katagori pelayanan rehabilitasi bidang sosial bagi penyandang yang diwajibkan dalam SPM terlayani sepenuhnya.
- ✚ Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), kurangnya SDM yang professional untuk penanganan PMKS tertentu yang membutuhkan penanganan intensif.
- ✚ Data kemiskinan yang tersedia relatip belum muktahir.
- ✚ Minimnya fasilitasi pendukung prasarana seperti shelter/rumah singgah, terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- ✚ Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.
- ✚ Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik

- ✚ Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
- ✚ Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap;
- ✚ Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.
- ✚ Penilaian KLA melibatkan lintas sektoral dan aplikasi penilaian mandiri dilakukan tergantung Kementerian PPPA sebagai leading sector
- ✚ Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT sering kali terhambat karena korban pada saat akan ditangani mencabut/membatalkan pengaduannya dan terbatasnya SDM yang memberikan layanan.

b. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam Pencapaian Sasaran, antara lain :

- ✚ Menyediakan sistem informasi atau aplikasi data kemiskinan daerah akan mendukung verifikasi dan validasi pemuktahiran data serta memfungsikan peran kecamatan dan kelurahan dalam melakukan pendataan;
- ✚ memberikan layanan terpadu dalam membantu warga untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial ;

- ✚ Meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial non pemerintah
- ✚ Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;
- ✚ Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- ✚ Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial;
- ✚ Melakukan MOU dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terkait dengan penanganan PMKS Disabilitas Mental;
- ✚ Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
- ✚ Dukungan anggaran yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai kompetensinya.
- ✚ Mengevaluasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPM bidang sosial baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.
- ✚ Peningkatan sinergi program/kegiatan lintas pemangku kepentingan melalui wadah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Singkawang;
- ✚ Penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak khususnya pada kelompok

rentan dan atau perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;

- ✚ Penguatan penanganan anak korban kekerasan secara holistik yang ditunjang mekanisme kerja yang efektif dan efisien dan fasilitas yang dibutuhkan dengan turut memperhatikan kesejahteraan petugas;
- ✚ Peningkatan sinergi dan koordinasi pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial sehingga dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan memperbesar peluang mendapatkan fasilitas-fasilitas serta dilibatkan dalam program baru yang dicanangkan kementerian.
- ✚ Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terhadap permasalahan anak.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Program-program, total keseluruhan dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Singkawang tahun 2022 Pemerintah Kota Singkawang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.401.344.790	3.248.371.661	95,50
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	68.583.800	31.186.783	45,47
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	6.945.000	6.945.000	100
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	385.121.267	384.606.945	99,87
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	154.240.600	154.238.400	100
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	94.337.200	94.307.550	99,97
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	57.117.998	56.923.500	99,66
8	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	39.479.500	38.670.000	97,95
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	27.869.000	11.888.000	42,66
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	88.705.500	76.466.461	86,20
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	33.940.000	20.120.000	59,28
JUMLAH		4.357.684.655	4.123.724.300	94,63

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan pagu anggaran DPPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 mencapai 94,63%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai “**sangat tinggi**”.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara tersirat tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2022. Dari penjelasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa berdasarkan skala peringkat kinerja capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 adalah **“Sangat Tinggi”** yaitu 94,38%. Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran pendukung kinerja yaitu sebesar 84,41%, maka tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya belum optimal dikarenakan tingkat capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Sedangkan Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai keseluruhan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA Perubahan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2022 sebesar Rp. **4.357.684.655,-** dan telah terealisasi sebesar Rp. **4.123.705.000,-** atau **94,63%** dari plafon anggaran.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan target Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah;
4. Dukungan dana yang lebih memadai dari pemerintah kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2022.

Singkawang, Januari 2023



KETALA DINAS

SUTIKARTO, S.ST,M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19660514 199010 1 001

L a m p i r a n

DOKUMENTASI PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)







DOKUMENTASI PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN UNTUK PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA MELALUI FAMILI DEVELOPMENT SSISSION (FDS) TAHUN 2022





DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK HUKUM SOSIAL MAUPUN EKONOMI TAHUN 2022



6



Nama Provinsi: KALIMANTAN BARAT

Nama Kabupaten/Kota: KOTA SINGKAWANG

Nilai Evaluasi KLA: 681.55

KELEMBAGAAN

Nilai Maksimal: 150.00

01. Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

1. Apakah tersedia peraturan daerah/kebijakan terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (Lampirkan Matriks dan Dokumen yang menunjukkan kebijakan penguatan kelembagaan dan 5 klaster tersebut!)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 45.00

Nilai: 43.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, Klaster dan indikator mana saja? Tunjukkan data dukungnya!

- [X] Kelembagaan. Indikator 1. Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (mencakup 5 klaster)
- [X] Klaster I. Indikator 4. Peraturan/Kebijakan terkait Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
- [X] Klaster I. Indikator 5. Peraturan/ kebijakan terkait Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA).
- [X] Klaster I. Indikator 6. Peraturan/kebijakan terkait Partisipasi Anak
- [X] Klaster II. Indikator 7. Peraturan/ Kebijakan terkait pencegahan Perkawinan Anak
- [X] Klaster II. Indikator 8. Peraturan/ kebijakan terkait Lembaga Konsultasi Keluarga
- [X] Klaster II. Indikator 9. Peraturan/ kebijakan terkait Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi
- [X] Klaster II. Indikator 10. Peraturan/ Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
- [X] Klaster II. Indikator 11a. Peraturan/ Kebijakan terkait infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- [] Klaster II. Indikator 11b. Peraturan/ Kebijakan terkait infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah
- [X] Klaster III. Indikator 12. Peraturan/ Kebijakan terkait Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- [] Klaster III. Indikator 13. Peraturan/ Kebijakan terkait Prevalensi Status Gizi Balita
- [X] Klaster III. Indikator 14. Peraturan/ Kebijakan terkait Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
- [X] Klaster III. Indikator 15. Peraturan/ Kebijakan terkait Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- [X] Klaster III. Indikator 16. Peraturan/ Kebijakan terkait Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak
- [X] Klaster III. Indikator 17. Peraturan/ Kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok
- [X] Klaster IV. Indikator 18. Peraturan/ kebijakan terkait Wajib Belajar 12 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- [X] Klaster IV. Indikator 19. Peraturan/kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)
- [X] Klaster IV. Indikator 20. Peraturan/ Kebijakan terkait fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak
- [X] Klaster V. Indikator 21b. Peraturan/ kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi
- [X] Klaster V. Indikator 21c. Peraturan/ Kebijakan terkait Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
- [X] Klaster V. Indikator 22a. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS
- [X] Klaster V. Indikator 22b. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik
- [X] Klaster V. Indikator 23a. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi
- [X] Klaster V. Indikator 23b. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
- [X] Klaster V. Indikator 24a. Peraturan/ Kebijakan terkait Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)
- [X] Klaster V. Indikator 24b. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

[] Tidak

Catatan:

ada

2. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk penyelenggaraan KLA? (Lampirkan Matriks, Data Dukung APBD yang ditandatangani oleh Bappeda, dan anggaran lainnya!)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 35.00

Nilai: 31.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Klaster dan Indikator mana saja?

- ☒ Kelembagaan. Indikator 1. Anggaran untuk penyelenggaraan Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (mencakup 5 klaster)
- ☐ Kelembagaan. Indikator 1.a. anggaran untuk rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala
- ☒ Kelembagaan. Indikator 1.b. anggaran untuk promosi KLA, anggaran untuk sosialisasi KLA
- ☐ Kelembagaan. Indikator 1.c. anggaran untuk Bimtek KHA
- ☐ Kelembagaan. Indikator 1.d. anggaran untuk pemantauan dan evaluasi KLA
- ☒ Klaster I. Indikator 4. anggaran untuk Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
- ☒ Klaster I. Indikator 5. anggaran untuk Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
- ☒ Klaster I. Indikator 6. anggaran untuk terlembaganya Partisipasi Anak
- ☒ Klaster II. Indikator 7. anggaran untuk Pencegahan Perkawinan Anak
- ☒ Klaster II. Indikator 9. anggaran untuk Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi
- ☒ Klaster II. Indikator 10. anggaran untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
- ☒ Klaster II. Indikator 11a. anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan RBRA
- ☐ Klaster II. Indikator 11b. anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program RASS
- ☒ Klaster III. Indikator 12. anggaran untuk Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- ☒ Klaster III. Indikator 13. anggaran untuk Prevalensi Status Gizi Balita
- ☒ Klaster III. Indikator 14. anggaran untuk Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
- ☒ Klaster III. Indikator 15. anggaran untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- ☒ Klaster III. Indikator 16. anggaran untuk Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak
- ☒ Klaster III. Indikator 17. anggaran untuk Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok
- ☒ Klaster IV. Indikator 18. anggaran untuk Wajib Belajar 12 Tahun
- ☒ Klaster IV. Indikator 19. anggaran untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)
- ☒ Klaster IV. Indikator 20. anggaran untuk fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak
- ☒ Klaster V. Indikator 21.a. anggaran untuk Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier dan sekunder)
- ☒ Klaster V. Indikator 21.b. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi
- ☒ Klaster V. Indikator 21.c. anggaran untuk Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
- ☒ Klaster V. Indikator 22.a. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS
- ☒ Klaster V. Indikator 22.b. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik
- ☒ Klaster V. Indikator 23.a. anggaran untuk Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi
- ☒ Klaster V. Indikator 23.b. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
- ☒ Klaster V. Indikator 24.a. anggaran untuk Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)
- ☒ Klaster V. Indikator 24.b. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

☐ Tidak

Catatan:

3. Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak? (Lampirkan dokumen usulan atau foto!)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 2.50

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?

- ☐ (a) Ya, seluruhnya
- ☒ (b) Ya, hanya sebagian
- ☐ Tidak

Catatan:

Peraturan Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Singkawang disusun dengan melibatkan peran forum anak khususnya pada saat penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham pada tahun 2016, Begitu pula penyusunan perwako tentang KTR yang telah mengundang Forum Anak pada tahun 2019

02. Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

1. Apakah telah terbentuk GT KLA? (Lampirkan SK dan susunan keanggotaan GT)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Sudah. Jika Sudah, apa dasar hukumnya?
- ☐ Belum. Jika Belum, Apa alasannya?

Catatan:

Belum terelasiaskan

2. GUGUS TUGAS (GT) KLA

Apakah GT KLA telah berfungsi? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

Sudah

Jika Sudah, apakah sudah berfungsi dengan optimal?

☒ (a) Berfungsi penuh (Kelembagaan dan 5 Klaster KLA)

☐ (b) Berfungsi sebagian (Tulis di kolom CATATAN Klaster mana saja yang berfungsi)

☐ Belum

Catatan:

3. RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KLA

Apakah sudah menyusun RAD KLA? (Lampirkan dokumen RAD)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Sudah. Jika Sudah, apa dasar hukumnya?

☐ Belum. Jika Belum, apa alasannya?

Catatan:

RAD dalam proses penyusunan dan hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 90 pada Perda Nomor 4/2017 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan

RAD juga sudah tercantum dalam RPD Kota Singkawang

4. Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya?

(Lampirkan dokumen pendukung!)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

☐ Ya

☒ Tidak

Catatan:

5. Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah diperbaharui setiap tahun?

☐ Ya

☐ Tidak

☒ Tidak

Catatan:

Belum

6. Apakah pemerintah daerah (Gugus Tugas KLA) mempunyai mekanisme pendataan untuk 5 klaster KLA yang minimal mempunyai 3 variabel, yaitu data terpilah jenis kelamin, kelompok umur, wilayah dan kondisi anak? (Lampirkan Matriks dan dokumen pendukungnya!)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ Ya
☒ Tidak

Catatan:

7. Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah? (Lampirkan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 2.50

Nilai: 2.50

Jawaban:

Ada

Jika Ada, sebutkan bentuk publikasi tersebut!

- ☒ (a) Media cetak
☒ (b) Media luar ruang
☒ (c) Media elektronik
☒ (d) Media sosial
☒ (e) Lainnya....(media tradisional, kampanye masal, dll)

☐ Tidak ada

Catatan:

Siaran Radio SaPA Singkawang bit.ly/dinsospppaskw

8. Apakah ada publikasi terkait KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir? (Lampirkan dokumen dan/atau foto pendukung)

Nilai Maksimal: 2.50

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ada

Jika ada, Berapa kali publikasi terkait KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir?

- ☒ (a) ... kali Media cetak (Tulis di catatan!)
☒ (b) ... kali Media luar ruang (Tulis di catatan!)
☒ (c) ... kali Media elektronik (Tulis di catatan!)
☒ (d) ... kali Media sosial (Tulis di catatan!)
☐ (e) ... kali Lainnya....(media tradisional, kampanye masal, dll) Tulis di catatan!

☐ Tidak ada

Catatan:

3 kali media cetak Pontianak Post

<https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/singkawang/19/11/2021/sinergi-wujudkan-singkawang-kota-layak-anak/>

4 kali media elektronik

<https://forumanak.id/kegiatanView/r04yoj0z3p>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/talkshow-fenomena-pengajuan-dispensasi-kawin-di-kota-singkawang-2-6>

03. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

1. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program klaster Kelembagaan maupun Kabupaten/Kota Layak Anak! (Lampirkan matriks, dokumen dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Perhatian!

Jawab pilihan berdasarkan total jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa(MM), dan Dunia Usaha(DU).

Contoh: LM 3, MM 2, DU 2. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+2=7.

Jumlah maksimal masing-masing LM, MM, DU adalah 3.

Bila masing-masing LM, MM, dan DU lebih dari 3 tetap dianggap maksimal 3. Tapi keseluruhan LM, MM, dan DU tetap dapat ditulis pada matriks.

Contoh LM 5, MM 2, DU 6. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+3 = 8 (bukan 13, tapi untuk ketigabelas LM, MM dan DU tersebut bisa disebutkan seluruhnya pada matriks)

Nilai Maksimal: 4.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 9
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 8
- ☒ Total Jumlah LM+MM+DU = 7
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 6
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 5
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 4
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 3
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 2
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 1
- ☐ Tidak ada

Catatan:

kampung dongeng terus bergerak dalam kegiatan anak-anak di setiap kecamatan, dimana dunia usaha dan media massa juga ikut andil dalam berpartisipasi maupun mempublikasikan setiap kegiatan.

1. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster I maupun Kabupaten/Kota Layak Anak! (Lampirkan matriks, dokumen dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Perhatian!

Jawab pilihan berdasarkan total jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa(MM), dan Dunia Usaha(DU).

Contoh: LM 3, MM 2, DU 2. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+2=7.

Jumlah maksimal masing-masing LM, MM, DU adalah 3.

Bila masing-masing LM, MM, dan DU lebih dari 3 tetap dianggap maksimal 3. Tapi keseluruhan LM, MM, dan DU tetap dapat ditulis pada matriks.

Contoh LM 5, MM 2, DU 6. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+3 = 8 (bukan 13, tapi untuk ketigabelas LM, MM dan DU tersebut bisa disebutkan seluruhnya pada matriks)

Nilai Maksimal: 4.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 9
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 8
- ☒ Total Jumlah LM+MM+DU = 7
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 6
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 5
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 4
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 3
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 2
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 1
- ☐ Tidak ada

Catatan:

Kampung dongeng singkawang bersinergi dalam program yang dibuat oleh para dunia usaha juga di publis oleh beberapa media massa.

1. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster II maupun Kabupaten/Kota Layak Anak! (Lampirkan matriks, dokumen dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Perhatian!

Jawab pilihan berdasarkan total jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa(MM), dan Dunia Usaha(DU).

Contoh: LM 3, MM 2, DU 2. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+2=7.

Jumlah maksimal masing-masing LM, MM, DU adalah 3.

Bila masing-masing LM, MM, dan DU lebih dari 3 tetap dianggap maksimal 3. Tapi keseluruhan LM, MM, dan DU tetap dapat ditulis pada matriks.

Contoh LM 5, MM 2, DU 6. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+3 = 8 (bukan 13, tapi untuk ketigabelas LM, MM dan DU tersebut bisa disebutkan seluruhnya pada matriks)

Nilai Maksimal: 4.50

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 9
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 8
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 7
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 6
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 5
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 4
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 3
- ☒ Total Jumlah LM+MM+DU = 2
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 1
- ☐ Tidak ada

Catatan:

Kegiatan Kampung dongeng yang diikuti oleh anak-anak selalu membawa dampak positif pada orangtua, orangtua mendampingi dan mendapat pengalaman baru dalam pengasuhan positif/alternatif pada anak-anak mereka, yang didukung juga oleh pihak dunia usia yang membuka ruang bagi kami

1. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster III maupun Kabupaten/Kota Layak Anak! (Lampirkan matriks, dokumen dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Perhatian!

Jawab pilihan berdasarkan total jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa(MM), dan Dunia Usaha(DU).

Contoh: LM 3, MM 2, DU 2. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+2=7.

Jumlah maksimal masing-masing LM, MM, DU adalah 3.

Bila masing-masing LM, MM, dan DU lebih dari 3 tetap dianggap maksimal 3. Tapi keseluruhan LM, MM, dan DU tetap dapat ditulis pada matriks.

Contoh LM 5, MM 2, DU 6. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+3 = 8 (bukan 13, tapi untuk ketigabelas LM, MM dan DU tersebut bisa disebutkan seluruhnya pada matriks)

Nilai Maksimal: 4.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 9
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 8
- ☒ Total Jumlah LM+MM+DU = 7
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 6
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 5
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 4
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 3
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 2
- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 1
- ☐ Tidak ada

Catatan:

LM+MM+DU=3+1+3=7

1. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster IV maupun Kabupaten/Kota Layak Anak! (Lampirkan matriks, dokumen dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Perhatian!

Jawab pilihan berdasarkan total jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa(MM), dan Dunia Usaha(DU).

Contoh: LM 3, MM 2, DU 2. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+2=7.

Jumlah maksimal masing-masing LM, MM, DU adalah 3.

Bila masing-masing LM, MM, dan DU lebih dari 3 tetap dianggap maksimal 3. Tapi keseluruhan LM, MM, dan DU tetap dapat ditulis pada matriks.

Contoh LM 5, MM 2, DU 6. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+3 = 8 (bukan 13, tapi untuk ketigabelas LM, MM dan DU tersebut bisa disebutkan seluruhnya pada matriks)

Nilai Maksimal: 4.50

Nilai: 4.50

Jawaban:

- ☒ Total Jumlah LM+MM+DU = 9
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 8
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 7
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 6
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 5
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 4
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 3
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 2
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 1
☐ Tidak ada

Catatan:

kegiatan lembaga yang terlibat , Media Masa....., Dunia Usaha

kegiatan kompetisi dalam pendidikan bukan hanya di sekolah , dunia usaha memberi tempat bagi kampung dongeng untuk melestarikan budaya dengan tari dan seni bertutur juga dalam pendidikan

1. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster V maupun Kabupaten/Kota Layak Anak! (Lampirkan matriks, dokumen dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Perhatian!

Jawab pilihan berdasarkan total jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa(MM), dan Dunia Usaha(DU).

Contoh: LM 3, MM 2, DU 2. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+2=7.

Jumlah maksimal masing-masing LM, MM, DU adalah 3.

Bila masing-masing LM, MM, dan DU lebih dari 3 tetap dianggap maksimal 3. Tapi keseluruhan LM, MM, dan DU tetap dapat ditulis pada matriks.

Contoh LM 5, MM 2, DU 6. Maka total jumlah LM+MM+DU = 3+2+3 = 8 (bukan 13, tapi untuk ketigabelas LM, MM dan DU tersebut bisa disebutkan seluruhnya pada matriks)

Nilai Maksimal: 4.50

Nilai: 1.50

Jawaban:

- ☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 9
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 8
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 7
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 6
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 5
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 4
☒ Total Jumlah LM+MM+DU = 3
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 2
☐ Total Jumlah LM+MM+DU = 1
☐ Tidak ada

Catatan:

Terdapat 3 Media Massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.

2. Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ Ya. Jika Ya, kapan (APSAI) Kabupaten/Kota dibentuk? Tuliskan tahun pada Catatan!
☒ Tidak

Catatan:

3. Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ Ya. Jika Ya, sebutkan upaya APSAI di kolom catatan!
☒ Tidak

Catatan:

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Nilai Maksimal: 115.00

04. Anak Yang Diregistrasi Dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

1. Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks! (Lampirkan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya
☐ Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya
☐ Tidak ada data

Catatan:

Laporan registrasi akta kelahiran anak dibuat setiap bulan

2. Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks!
(Lampirkan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya
☐ Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya
☐ Tidak ada data

Catatan:

Laporan pencetakan akta kelahiran anak dibuat setiap bulan

3. Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks! (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya
☐ Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya
☐ Tidak ada data

Catatan:

Laporan KIA dibuat setiap bulan

4. Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59? (Lampirkan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 7.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

Ya, sebutkan!

- ☒ (a) SOP Percepatan Pengurusan kolektif
☒ (b) Mekanisme Percepatan Pengurusan anak tanpa identitas dengan melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, Kesbangpol, Polres, bidan, LPKS, LPKA, panti asuhan, pondok pesantren tradisional, lembaga masyarakat, lembaga kemanusiaan dll
☐ (c) Lainnya: sebutkan pada matriks!
☐ Tidak

Catatan:

Pengurusan Akta Kelahiran dan KIA kolektif dikoordinir oleh RS , RSIA serta Bidan Swasta yg diberi akses khusus ke aplikasi 3in1 Kerjasama dengan RSUD dr. Abdul Azis Singkawang melalui aplikasi 3 in1

5. Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, sebutkan pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

Setifikat mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak dari Petugas Dukcapil

6. Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)? (LAMPIRKAN MATRIKS, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, sebutkan pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

Dinas Sosial PPPA
RSUD dr. Abdul Azis Singkawang

7. Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, deskripsikan inovasinya? (tuliskan dalam kolom catatan)

☐ Tidak

Catatan:

Inovasi percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah dilaksanakan menggunakan aplikasi Dukcapil Online Kota Singkawang, penduduk maupun fasilitas kesehatan (RS, RSIA, Bidan Swasta dll) dapat melakukan registrasi bayi lahir untuk didaftarkan kedalam Kartu Keluarga penerbitan Akta Kelahiran Dan Kartu Identitas Anak sekaligus, registrasi dilakukan dengan mendownload formulir dan mengupload kembali formulir yg sudah diisi beserta lampiran persyaratan lainnya, dan setelah dokumen KK, Akta Lahir dan KIA telah dicetak pemohon dapat mengambil dokumen tersebut di Dinas Dukcapil dengan membawa berkas asli yg sudah diupload.

05. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

1. Apakah ada fasilitas Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia? (LAMPIRKAN MATRIKS, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 8.00

Jawaban:

Ya.

Ada berapa fasilitas layanan? Sebutkan bentuk fasilitas layanan yang tersedia dalam matriks!

- ☐ 10 layanan atau lebih
- ☐ 9 layanan
- ☒ 8 layanan
- ☐ 7 layanan
- ☐ 6 layanan
- ☐ 5 layanan
- ☐ 4 layanan
- ☐ 3 layanan
- ☐ 2 layanan
- ☐ 1 layanan

☐ Tidak

Catatan:

Dinas Kominfo Singkawang 1 Layanan
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Singkawang 7 Layanan
Dinas Pendidikan dan kebudayaan 1 Layanan

2. Apakah ada fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)? Sebutkan Fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi PISA?
(LAMPIRKAN MATRIKS, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG!)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya.

Ada berapa layanan? Sebutkan Fasilitas Layanan Informasi yang sudah terstandarisasi dalam matriks!

- ☐ 10 layanan atau lebih
- ☐ 9 layanan
- ☐ 8 layanan
- ☐ 7 layanan
- ☐ 6 layanan
- ☐ 5 layanan
- ☐ 4 layanan
- ☐ 3 layanan
- ☐ 2 layanan
- ☐ 1 layanan

☒ Tidak

Catatan:

3. Berapa jumlah anak yang mengakses fasilitas layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)
Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)?

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya
- ☐ Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya
- ☐ Tidak ada data

Catatan:

4. Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK dll)? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya, sebutkan pada matriks!
☐ Tidak

Catatan:

Fasilitas Layanan Yang Tersedia Di Perpustakaan Dapat Digunakan Oleh Seluruh Anak.

5. Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung!)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya, Jika Ya, apakah mekanisme tersebut berjalan optimal? Sebutkan bentuk mekanisme tersebut pada matriks!
☐ Tidak

Catatan:

Keputusan Wali Kota NOMOR 555/ 160/KOMINFO.IKP-A TAHUN 2019 tentang PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA SINGKAWANG

6. Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandardisasi sudah tersertifikasi ramah anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- Ya
Berapa jumlahnya? Sebutkan pada matriks!
☐ Lebih dari 1 orang
☐ 1 orang
☐ Sebagai peserta
☒ Tidak

Catatan:

7. Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ Ya, sebutkan pada matriks!
☒ Tidak

Catatan:

8. Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan dll. (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung!)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya, sebutkan pada matriks!
☐ Tidak

Catatan:

9. Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, deskripsikan inovasinya? (tuliskan dalam kolom catatan)
☐ Tidak

Catatan:

Pojok Pintar Merupakan Inovasi Dari Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Singkawang. Untuk mengakses Video Pojok Pintar silahkan klik <https://youtu.be/Rte1OCBH-3o>

06. Pelembagaan Partisipasi Anak

1. Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ (a) > 50 %
☐ (b) ≤ 50 %
☐ (c) Belum ada

Catatan:

SK Forum Anak Kecamatan di Upload pada Indikator Kelana, begitu pula forum anak kelurahan

2. Berapa persen desa/kelurahan memiliki Forum Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) > 25 %
☐ (b) 15 % - 25 %
☒ (c) 1%-14%
☐ (d) belum ada

Catatan:

3. Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah? (Lampirkan matriks & dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 12.00

Nilai: 7.00

Jawaban:

Ya

Di berapa tingkatan kepengurusan? Jelaskan dan sebutkan pada matriks!

- ☐ Di semua tingkatan kepengurusan FA
☒ 2 Tingkatan kepengurusan FA
☐ 1 Tingkatan kepengurusan FA
☐ Tidak

Catatan:

Forum Anak dilibatkan baik dalam musrenbang tingkat Kota dan Kecamatan

4. Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)? Dalam hal ini, Forum Anak dinilai peranannya dalam berbagai klaster dan indikator. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 21.00

Nilai: 15.00

Jawaban:

Ya

Peranannya dalam klaster dan indikator apa saja?

- ☒ Hak Sipil dan Kebebasan. Indikator Kepemilikan akta kelahiran bagi anak
- ☒ Hak Sipil dan Kebebasan. Indikator Informasi Layak Anak
- ☒ Hak Sipil dan Kebebasan. Indikator Partisipasi Anak
- ☒ Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Indikator Pencegahan Perkawinan Anak
- ☐ Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Indikator Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
- ☐ Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Indikator Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
- ☒ Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Indikator Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif
- ☒ Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Indikator Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak
- ☐ Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Indikator Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- ☐ Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Indikator Status Gizi Balita
- ☐ Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Indikator Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
- ☒ Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Indikator Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- ☒ Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Indikator Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak
- ☒ Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Indikator Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok
- ☒ Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya. Indikator Wajib Belajar 12 Tahun
- ☐ Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya. Indikator Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)
- ☒ Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya. Indikator Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak
- ☒ Perlindungan Khusus. Indikator Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga
- ☒ Perlindungan Khusus. Indikator Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya
- ☒ Perlindungan Khusus. Indikator Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang
- ☒ Perlindungan Khusus. Indikator Anak yang mengalami Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)

☐ Tidak

Catatan:

Link Forum Anak Kota dapat diakses melalui bit.ly/dinsospppaskw

Link Photovoice Forum Anak <https://drive.google.com/drive/folders/1KMdC1O2bUsYyxXKDBFsqpVzVAOntv3OQ?usp=sharing>

Link Instagram Forum Anak Kecamatan

Singkawang Utara : https://instagram.com/_fanta?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Singkawang Selatan = https://instagram.com/forumanakskwselatan_gaskan?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Singkawang Timur = <https://instagram.com/fasingkawangtimur?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Singkawang Barat = https://instagram.com/singbarber_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Singkawang Tengah = <https://instagram.com/fasingkawangtengah?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

5. Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

☒ Ya, sebutkan pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

Pada kegiatan Forum Anak tahun 2021 dihadirkan narasumber Bapak Dr. Hamid Patilima yang memberikan materi terkait Konvensi Hak Anak pada peserta kegiatan

6. Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD), Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya, sebutkan pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bappeda Kota Singkawang, Kampung Dongeng, Radio Rapensi, Fadli Hasan Studio, Fanxpert, Wellbeing Cita, Nans Studio, Sanggar Ananda, Pontianak Post, Polres Singkawang, Pengadilan Agama Kota Singkawang, Rumangsa Pontianak, Angkuts

Forum anak merupakan bagian dari puspa yang terdiri atai berbagai organisasi masyarakat media masa peduli perempuan dan anak

7. Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya, deskripsikan inovasinya? (tuliskan dalam kolom catatan)

☐ Tidak

Catatan:

1. Pengintegrasian Bussines Model Canvas (BMC) ke dalam sistematika berfikir forum anak Aku Lihat, Aku Tahu dan Aku Akan, BMC dimasukan kedam bagian Aku Akan
2. Bank Sampah Fantasi yang di kelola Divisi Pendidikan pada Forum anak Kota Singkawang yang menyasar pada sekolah-sekolah anggota forum anak yang diinisiasi sejak tahun 2021
3. Posyandu Remaja Fantasi yang diinisiasi sejak tahun 2021 di fasilitasi Dinas Kesehatan dan KB serta puskesmas Singkawang Barat
4. Project penulisan buku suara hati anak mengungkap cara anak mempersepsi peristiwa kemalangan yang dirasakan dalam pengasuhan dibawah bimbingan Fanxpert yang juga penulis 20 buku yaitu Natalia Dennonoupa
5. Kegiatan berkelanjutan dari regenerasi go to the moon, regenrasi kecamatan galaxy journey hingga menelurkan Ide cover lagu kejutan ku dengan tema video yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam regenerasi forum anak menjadi astronot ke bulan dengan perlengkapan seadanya kreasi forum anak kota singkawang https://www.youtube.com/watch?v=ap_w-gwINlg
5. Fantasi Game yang diadaptasi dari Squid game muncul dari ide anak-anak yang bosan dengan kegiatan daring dan mengems permainan dengan sistem ala squid game yang saat itu tengah populer

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Nilai Maksimal: 170.00

07. Pencegahan Perkawinan Anak

1. Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ada. Jika ada, jelaskan berapa jumlah perkawinan usia anak terjadi selama satu tahun terakhir pada matriks

☐ Tidak ada

Catatan:

2. Apakah ada SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

Ada.

Jika ada, apa lembaga penyelenggaranya?

- ☐ (a) Pemda
☐ (b) Lembaga Masyarakat
☐ (c) Dunia Usaha
☐ (d) Media Massa
☐ (e) Perguruan Tinggi
☒ (f) Pusat

☐ Tidak ada

Catatan:

3. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 29.00

Nilai: 24.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya?

- ☒ (a) Sistem pengaduan dan pendampingan
 - ☒ (b) Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga rentan
 - ☒ (c) Pelatihan keterampilan untuk semua anak
 - ☒ (d) Pencegahan Putus Sekolah/Wajib belajar 12 tahun (termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus)
 - ☒ (e) Bantuan modal usaha kepada keluarga rentan
 - ☒ (f) Kampanye/sosialisasi/penyuluhan
 - ☒ (g) Edukasi Kesehatan Reproduksi
 - ☒ (h) Pengasuhan Remaja
 - ☐ (i) Lainnya
- ☐ Tidak

Catatan:

1. Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang (Penyuluhan bagi 400 Remaja Kota Singkawang untuk Mencegah Pernikahan Dini)

4. Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 6.00

Nilai: 6.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, deskripsikan inovasinya! (Tuliskan dalam kolom catatan)
- ☐ Tidak

Catatan:

1. Talkshow "Fenomena Pengajuan Dispensasi Kawin di Kota Singkawang"

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/talkshow-fenomena-pengajuan-dispensasi-kawin-di-kota-singkawang-2-6>

Salah satu cara yang dilakukan guna mengedukasi masyarakat guna menekan laju perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun adalah dengan melakukan talkshow (mendiskusikan suatu topik dengan suasana santai tapi serius). Hal tersebut telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang. Kegiatan tersebut dilakukan di basement Kantor Walikota Singkawang yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2021. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut salah satunya dari Pengadilan Agama Singkawang dalam hal ini diwakili oleh Nashihul Hakim S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Singkawang. Materi yang disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan Fenomena Pengajuan Dispensasi Kawin di Kota Singkawang dengan peserta anak usia 13 s.d 18 tahun. Hadir pula dalam acara tersebut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Singkawang dan Disdukcapil Kota Singkawang.

08. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

1. Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA atau LK3 atau BKB/BKR, atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga sejenis)/Layanan keluarga dengan penyediaan kelompok profesi seperti: Pekerja Sosial, psikolog, konselor/Guru BK atau sejenisnya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 15.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, apa jenis layanannya? (Tuliskan pada matriks!)
- ☐ Tidak

Catatan:

1. Layanan Pengaduan
2. layanan Konsultasi keluarga
3. Layanan Mediasi Keluarga Berkonflik
- 4 Layanan Konsultasi Interaktif melalui media radio (SaPA)

2. Berapa jumlah keluarga dan/atau Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) yang mendapatkan layanan PUSPAGA atau Lembaga sejenis lainnya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 7.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ Data tersedia, tulis pada matriks!
☒ Data tidak tersedia

Catatan:

3. Berapa jumlah kasus perceraian dua tahun terakhir? (Lampirkan dokumen pendukungnya!)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Data tersedia, tulis pada catatan!
☐ Data tidak tersedia

Catatan:

data tersedia
2020 : 277
2021 : 335

4. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, apa bentuknya?
☐ (a) Peraturan Bupati/ Walikota
☒ (b) Keputusan Bupati/ Walikota
☐ (c) Instruksi Bupati/ Walikota
☐ (d) Surat Edaran Bupati/ Walikota
☐ Tidak

Catatan:

1. Surat Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "PELANGI" Kota Singkawang
2. Surat Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Pembentukan Forum PUSPA Kota Singkawang
3. SK. Panitia SaPA

5. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya? (Lampiran dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- Ya
Jika ya, alokasinya bersumber dari mana?
☒ (a) APBD > ABPN
☐ (b) APBD < ABPN
☐ Tidak

Catatan:

Anggaran untuk Forum PUSPA Kota Singkawang

6. Apakah SDM pada PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya?

- ☐ (a) Pemda
- ☐ (b) Lembaga Masyarakat
- ☐ (c) Dunia Usaha
- ☐ (d) Media Massa
- ☐ (e) Perguruan Tinggi
- ☒ (f) Pusat

☐ Tidak

Catatan:

7. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) terkait dalam program PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

Dinas Sosial PPPA dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kegiatan SaPA melalui Radio Pendidikan Singkawang (Rapensi)

8. Apakah ada program inovasi untuk pengembangan, PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 6.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

☐ Ya. Jika Ya, deskripsikan inovasinya! (Tuliskan dalam kolom catatan)

☒ Tidak

Catatan:

09. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

1. Apakah ada desa/kelurahan memiliki PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika Ya, berapa jumlah PAUD-HI dan dari berapa desa/kelurahan? (Tulis pada catatan)

☐ Tidak

Catatan:

SK Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Kota Singkawang terdapat 5 PAUD HI

2. Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan! (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya?

- ☐ (a) Pemda
- ☐ (b) Lembaga Masyarakat
- ☐ (c) Dunia Usaha
- ☐ (d) Media Massa
- ☐ (e) Perguruan Tinggi
- ☒ (f) Pusat

☐ Tidak

Catatan:

Melalui E Learning KemenPPPA, pada tahun 2019 pernah dilakukan pelatihan Oleh Setda Kota Singkawang yang menasar peserta tenaga pendidik dari satuan pendidikan termasuk Kelompok Bermain

3. Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 1.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang sebagai Pembina Kelompok Kerja Bunda Paud Kota Singkawang

4. Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika Ya, deskripsikan inovasinya! (Tuliskan dalam kolom catatan)

☐ Tidak

Catatan:

Pembentukan Pokja Bunda PAUD yang salah satu tujuannya mendorong pengembangan PAUD HI lintas sektor

10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

1. Apakah ada dan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif yang terstandardisasi (LKSA Terstandar, Pesantren, Sekolah Berasrama dan Daycare/TPA/TARA (Taman Asuh Ceria)? (Lampirkan Matriks dan dokumen pendukung!)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 8.00

Nilai: 8.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika Ya, tuliskan apa saja dan jumlahnya pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

LKSA Achmad Yani, LKSA Al-Amin, LKSA Yasti, LKSA Ushuludin, LKSA Abigael, LKSA Al-Ma'arif, LKSA Gloria, LKSA Ibnu Taimiyah, LKSA Sidrotul Muntaha

2. Apakah terdapat Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak)? (Lampirkan dokumen pendukung!)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika Ya, berapa jumlah anak yang berhasil diadopsi? (Tulis pada catatan!)

☐ Tidak

Catatan:

ada 2 anak yang diadopsi tahun 2021

3. Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya?

- ☐ (a) Pemda
☐ (b) Lembaga Masyarakat
☐ (c) Dunia Usaha
☐ (d) Media Massa
☐ (e) Perguruan Tinggi
☒ (f) Pusat

☐ Tidak

Catatan:

Pernah mengikuti SPA di Kota Pontianak yang diadakan oleh Pemda

4. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

Ada MOU antara dinas sosial dengan 3 LKSA terkait penanganan abh yaitu Lksa Abigael, Al-ma'arif dan Yasti

5. Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 6.00

Nilai: 6.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika Ya, deskripsikan inovasinya! (Tuliskan dalam kolom catatan)

☐ Tidak

Catatan:

Program Inovasi "Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Singkawang"

11. Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik

1. RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)

Apakah ada Ruang Bermain Anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 10.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika Ya sebutkan nama RBA, Alamat, dan Pengelola serta Status Standar RBRA

☐ Tidak

Catatan:

1. Polres Singkawang
2. RBBA Taman Cahaya Madani
3. RBBA Taman Burung
4. RBBA Taman Gunung Sari
5. RBBA Kantor Walikota Singkawang
6. RBBA Lapangan Basket Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

2. Apakah SDM pengelola RBBA dilatih KHA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya?

- ☐ (a) Pemda
☐ (b) Lembaga Masyarakat
☐ (c) Dunia Usaha
☐ (d) Media Massa
☐ (e) Perguruan Tinggi
☒ (f) Pusat
☐ Tidak

Catatan:

Pelatihan e-learning oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (evidence dari Dinas Sosial)

3. Siapa Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap RBBA? Sebutkan PD yang bertanggung jawab pada catatan!

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ada, Dinas(Sebutkan Jawaban di Catatan)
☐ Tidak ada

Catatan:

1. Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perwako TTg Struktur)
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Perpustakaan
4. Dinas PUPR
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

4. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan RBBA? (Lampirkan dokumen pendukung). Sebutkan PD yang berperan pada matriks!
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!
☐ Tidak

Catatan:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perangkat daerah yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak
2. Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang mengelola ruang terbuka hijau untuk penyediaan ruang bermain ramah anak
3. Dinas PUPR sebagai perangkat daerah yang membangun prasarana utama pengadaan ruang terbuka hijau untuk penyediaan ruang bermain ramah anak
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan untuk kegiatan (Perwako ttg Struktur)
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Khususnya di bidang PORA berperan mengelola sarana dan prasarana serta memfasilitasi penyediaan ruang bermain ramah anak

5. Apakah ada program inovasi pengembangan RBBA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, deskripsikan inovasinya! (Tuliskan dalam kolom catatan)
☐ Tidak

Catatan:

1. Pembangunan ruang untuk aktivitas olah raga di RBBA Taman Cahaya Madani berupa lapangan basket, lapangan skateboard, olah raga permainan anak (Link <https://www.facebook.com/TribunPontianakInteraktif/videos/wajah-baru-taman-cahaya-madani-gayung-bersambut-kota-singkawang/1232156973917406/>)
2. Penambahan fasilitas permainan anak serta aktivitas berolah raga, hiburan anak
3. Penambahan fasilitas permainan anak
(Foto)
4. Pembenahan fasilitas bermain ramah anak pada lapangan kridasana, kridamandala, lapangan basket untyk mendukung kegiatan anak2 pada bidang olahraga
5. Tidak dipungut bayaran untuk masuk dan menggunakan fasilitas di ruang bermain anak

6. RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)

Apakah ada sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, berapa jumlah sekolah yang telah memiliki RASS, ZoSS? (Tuliskan pada catatan)
☐ Tidak

Catatan:

- untuk jumlah sekolah yang terdapat ZoSS ada 2 Sekolah, yaitu :
1. SDN 27 Singkawang
 2. SDN 46 Singkawang

7. Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya?

- ☐ (a) Pemda
☐ (b) Lembaga Masyarakat
☐ (c) Dunia Usaha
☐ (d) Media Massa
☐ (e) Perguruan Tinggi
☒ (f) Pusat
☐ Tidak

Catatan:

8. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam Program RASS? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 1.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!
☐ Tidak

Catatan:

9. Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas perjalanan anak ke dan dari sekolah? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya?

☐ (a) Dinas Perhubungan

☒ (b) Polres

☐ (c) Dinas Pendidikan

☐ Tidak

Catatan:

SATLANTAS POLRES SINGKAWANG TELAH MELAKSANAKAN REKAYASA LALU LINTAS TERHADAP ANAK-ANAK SEKOLAH

10. Berapa jumlah kecelakaan lalu-lintas ? Berapa jumlah anak yang menjadi korban kecelakaan dan pelaku kecelakaan?

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

☒ Data tersedia, tulis pada catatan! Jumlah kecelakaan, jumlah anak korban kecelakaan dan pelaku kecelakaan

☐ Data tidak tersedia

Catatan:

JUMLAH KECELAKAAN YANG MELIBATKAN ANAK PADA TAHUN 2021 SEBANYAK 6 KASUS

JUMLAH ANAK KORBAN KECELAKAAN TAHUN 2021 SEBANYAK 6 ORANG

JUMLAH ANAK PELAKU KECELAKAAN TAHUN 2021 SEBANYAK 2 ORANG

11. Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

☒ Ya. Jika Ya, deskripsikan inovasinya! (Tuliskan dalam kolom catatan)

☐ Tidak

Catatan:

Untuk inovasi yang dibuat Dinas Perhubungan guna mendukung Infrastruktur ramah anak, yaitu:

1. Belud, yang berupa buku saku panduan keselamatan berlalu lintas yang ditujukan kepada anak-anak sekolah dan telah di sosialisasikan pada sekolah di Kota Singkawang
 2. TCR (Traffic Control Room), yang berupa pemantauan lalu lintas dan himbauan yang dilakukan melalui kamera dan audio langsung pada beberapa titik di Kota Singkawang
 3. Penambahan sarana olah raga di Taman Cahaya Madani
 4. Penambahan fasilitas penerangan dan keindahan pada taman cahaya madani dan taman burung
- Inovasi Infrastruktur Ramah Anak Oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan :
1. Lorong Singkawang Heritage (Lorong jalan penghubung Jl. Sejahtera dan Jl. Diponegoro) yang bebas dari kendaraan bermotor

Inovasi Infrastruktur Ramah Anak yang telah dibuat Satlantas Polres Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya ruang bermain anak di Pelayanan SAMSAT dan SATPAS Polres Singkawang
2. Tersedianya ruang Laktasi di Pelayanan Samsat dan SATPAS Polres Singkawang

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Nilai Maksimal: 150.00

12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

1. Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.50

Nilai: 2.50

Jawaban:

☒ (a) > 75%

☐ (b) 51-75%

☐ (c) 26-50 %

☐ (d) 1-25%

☐ (e) Tidak ada data

Catatan:

2. Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ (a) > 75%
☐ (b) 50-75%
☐ (c) <50 %
☐ (d) Tidak ada data

Catatan:

3. Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi?
Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) > 75%
☐ (b) 50-75%
☒ (c) <50 %
☐ (d) Tidak ada data

Catatan:

4. Berapa Jumlah Kematian Bayi? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.50

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) Tidak ada
☐ (b) 1-20 anak
☒ (c) >20 anak

Catatan:

5. Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.50

Nilai: 1.50

Jawaban:

- ☐ (a) Tidak ada
☒ (b) 1-20 ibu
☐ (c) >20 ibu

Catatan:

6. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam mencegah kematian ibu melahirkan? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!
☐ Tidak

Catatan:

Walikota, IBI Kota Singkawang, Akbid WBI Kota Singkawang, RSUD dan RSU Swasta

7. Apakah ada program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.50

Nilai: 2.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. Jelaskan inovasinya! (Tulis pada catatan1)
☐ Tidak

Catatan:

13. Status Gizi Balita

1. Berapa persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☐ (a) Di atas angka nasional, dengan angka persentase kekurangan gizi lebih besar dari tahun sebelumnya
☐ (b) Di atas angka nasional, dengan angka persentase kekurangan gizi lebih kecil dari tahun sebelumnya
☐ (c) Di bawah angka nasional, dengan angka persentase kekurangan gizi lebih besar dari tahun sebelumnya
☒ (d) Di bawah angka nasional, dengan angka persentase kekurangan gizi lebih kecil dari tahun sebelumnya
☐ (e) Tidak ada data

Catatan:

2. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☐ (a) Di atas angka nasional, dengan angka masalah gizi lebih lebih besar dari tahun sebelumnya
☐ (b) Di atas angka nasional, dengan angka masalah gizi lebih lebih kecil dari tahun sebelumnya
☐ (c) Di bawah angka nasional, dengan angka masalah gizi lebih lebih besar dari tahun sebelumnya
☒ (d) Di bawah angka nasional, dengan angka masalah gizi lebih lebih kecil dari tahun sebelumnya
☐ (e) Tidak ada data

Catatan:

3. Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☐ (a) Di atas angka nasional, dengan angka persentase balita stunting lebih besar dari tahun sebelumnya
☐ (b) Di atas angka nasional, dengan angka persentase balita stunting lebih kecil dari tahun sebelumnya
☐ (c) Di bawah angka nasional, dengan angka persentase balita stunting lebih besar dari tahun sebelumnya
☒ (d) Di bawah angka nasional, dengan angka persentase balita stunting lebih kecil dari tahun sebelumnya
☐ (e) Tidak ada data

Catatan:

4. Apakah ada tim penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

- ☒ (a) Memiliki SOP dan aktif dalam kegiatannya
☐ (b) Memiliki SOP namun hanya sebagian yang aktif dalam kegiatan
☐ (c) Memiliki SOP namun tidak aktif dalam kegiatan
☐ (d) Tidak ada

Catatan:

5. Apakah ada keikutsertaan Forum Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung) Sebutkan Forum Pemberdayaan Masyarakat yang berperan! (Sebutkan di Catatan)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuk keikutsertaan nya?

- ☐ (a) Melakukan dukungan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
- ☒ (b) Memperkuat edukasi dan pendampingan terkait intervensi masalah gizi
- ☐ (c) Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan intervensi masalah gizi
- ☐ Tidak

Catatan:

Keikutsertaan Forum Pemberdayaan Masyarakat (Kelompok Peduli Asi)

6. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.50

Nilai: 2.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya dalam matriks?
- ☐ Tidak

Catatan:

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, Dinas kesehatan dan KB Kota Singkawang, Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM Gunung Poteng Singkawang,

7. Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi ? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)
- ☐ Tidak

Catatan:

Inovasi Kabisalita dan Gebyar Posyandu Balita

14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

1. Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

- ☒ (a) Di atas angka nasional, dengan angka Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (b) Di atas angka nasional, dengan angka Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih kecil dari tahun sebelumnya
- ☐ (c) Di bawah angka nasional, dengan angka Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (d) Di bawah angka nasional, dengan angka Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih kecil dari tahun sebelumnya
- ☐ (e) Tidak ada data

Catatan:

2. Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir? (Lampirkan dokumen pendukung data pembandingan nasional dan data tahun sebelumnya)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

- ☒ (a) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (b) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya
- ☐ (c) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (d) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya
- ☐ (e) Tidak ada data

Catatan:

3. Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang menerima MP-ASI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) Di atas angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (b) Di atas angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI lebih kecil dari tahun sebelumnya
- ☐ (c) Di bawah angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (d) Di bawah angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI lebih kecil dari tahun sebelumnya
- ☒ (e) Tidak ada data

Catatan:

4. Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ (a) Di atas angka nasional, dengan angka Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (b) Di atas angka nasional, dengan angka Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI tahun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- ☐ (c) Di bawah angka nasional, dengan angka Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (d) Di bawah angka nasional, dengan angka Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- ☐ (e) Tidak ada data

Catatan:

5. Persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data pembandingan disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ (a) >90%
- ☐ (b) 75% - 90%
- ☐ (c) 50% - 74%
- ☐ (d) 25% - 49%
- ☐ (e) <25 %

Catatan:

6. Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data pembandingan keseluruhan disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ (a) >90%
- ☐ (b) 75% - 90%
- ☐ (c) 50% - 74%
- ☐ (d) 25% - 49%
- ☐ (e) <25 %

Catatan:

7. Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat keseluruhan Konselor) Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota? (Sebutkan di Catatan)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya
☐ Tidak

Catatan:

Terdapat 38 orang konselor ASI yang sudah dilatih, yang terdapat sertifikat hanya 3 orang dan ada 1 angkatan yang belum menerima sertifikat

8. Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota?(Lampirkan sertifikat konselor PMBA) Berapa jumlahnya? (Sebutkan di Catatan)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya, sebutkan jumlahnya dalam dua tahun terakhir
☐ Tidak

Catatan:

Konselor PMBA ada 9 orang

9. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya dalam matriks!
☐ Tidak

Catatan:

Penanganan Masalah Gizi Buruk

10. Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)
☐ Tidak

Catatan:

15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

1. Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah di SK-an? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara PRAP dan jumlah keseluruhan puskesmas di wilayah kabupaten/kota)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ > 75% PRAP yang di SK-an
☐ 50% - 75% PRAP yang di SK-an
☐ 25% - < 50%
☐ < 25%
☐ Tidak ada data

Catatan:

Terdapat 10 Puskesmas Ramah Anak yang sudah di SK kan

2. Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri? (Lampirkan Dokumen Pendampingan dan evaluasi)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☐ > 75% PRAP
- ☐ 50% - 75% PRAP
- ☒ 25% - < 50% PRAP
- ☐ < 25% PRAP
- ☐ Tidak ada data

Catatan:

3. Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskemas (PRAP) yang terstandarisasi? (Lampirkan Dokumen Pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ > 1 PRAP yang terstandarisasi
- ☐ 1 PRAP yang terstandarisasi
- ☒ Belum ada

Catatan:

4. Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?

- ☐ (a) Pemda
 - ☐ (b) Lembaga Masyarakat
 - ☐ (c) Dunia Usaha
 - ☐ (d) Media Massa
 - ☐ (e) Perguruan Tinggi
 - ☐ (f) Pusat
- ☒ Tidak

Catatan:

Pelatihan belum dilaksanakan, tetapi sosialisasi pelayanan ramah anak sudah dilakukan

5. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya dalam matriks!
- ☐ Tidak

Catatan:

6. Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)
- ☐ Tidak

Catatan:

16. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)

1. Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya

☒ Lebih besar dari tahun sebelumnya

☐ Lebih kecil dari tahun sebelumnya

Tidak

Jika Tidak, darimanakah sumber airnya?

☐ (a) Sumur timba/pipa

☐ (b) Sambungan komunal

☐ (c) Mata air setempat

Catatan:

Jumlah sambungan rumah untuk akses air minum dari PDAM sebanyak 19.567 SSR

2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak? (Lampirkan dokumen pendukung dan data rumah tangga yang ada di wilayah kab/kota)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 2.00

Jawaban:

☐ (a) >90%

☐ (b) 75% - 90%

☒ (c) 50% - 74%

☐ (d) 25% - 49%

☐ (e) <25 %

Catatan:

3. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk upaya yang dilakukan?

☒ (a) Penyuluhan ke rumah tangga

☒ (b) Memperluas akses mendapatkan air bersih

☒ (c) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya

☐ Tidak

Catatan:

Menambah jaringan layanan air bersih yang layak di Kota Singkawang

4. Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (PAMRT)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk upaya yang dilakukan?

☒ (a) Penyuluhan ke rumah tangga

☐ (b) Penyuluhan di Puskesmas/Posyandu

☐ Tidak

Catatan:

5. Berapa Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)? (Lampirkan dokumen pendukung). Sebutkan di catatan!

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☒ (b) 51% - 75%
☐ (c) 1% - 50%
☐ (d) 0

Catatan:

Jamban Sehat

6. Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)? (Lampirkan data pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya
☐ Tidak

Catatan:

7. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya dalam matriks!
☐ Tidak

Catatan:

Dinas yang menjadi mitra dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga antara lain : Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM Gunung Poteng Singkawang
Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 658.31/519/PUPR.CKP-B Tahun 2021

8. Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)
☐ Tidak

Catatan:

Program Pemasangan Satuan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) dengan harga murah

17. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

1. Apabila sudah memiliki peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok; Apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

☒ (a) Di semua kawasan tanpa rokok dipasang sign/tanda bahwa kawasan tersebut adalah kawasan tanpa rokok

☐ (b) Di semua kawasan tanpa rokok dipasang papan petunjuk yang berisi penjelasan tentang Peraturan dan definisi kawasan tanpa rokok

☒ (c) Bekerjasama dengan media massa daerah untuk memberitakan secara berkala tentang peraturan KTR

☐ Tidak

Catatan:

sudah di sosialisasikan di beberapa tatanan diantaranya

1. Sekolah
2. Fasilitas Kesehatan
3. tempat wisata
4. di Tempat Kerja

2. Apakah dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

☒ (a) Teguran

☐ (b) Denda, sebutkan jumlahnya pada catatan!

☐ (c) Kurungan, sebutkan lamanya pada catatan!

☐ Tidak

Catatan:

belum ada pasal yang mengatur tentang sanksi berupa denda ataupun kurungan . perwako no 5 tahun 2019 hanya mengatur tentang sanksi administratif berupa

1. peringatan lisan
 2. peringatan tertulis
 3. penghentian sementara kegiatan
 4. pencabutan izin
- (BAB VIII Pasal 25 ayat 1)

3. Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan? (Lampirkan dokumen pendukung berupa foto KTR di Fasilitas Kesehatan dan data perbandingan jumlah keseluruhan faskes dengan faskes yang sudah menerapkan KTR). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan pada tahun sebelumnya!

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

☐ (a) 76 % - 100%

☒ (b) 51 % - 75%

☐ (c) 26% - 50%

☐ (d) kurang dari 25%

☐ (e) Belum ada

Catatan:

4. Apakah tersedia Penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan termasuk pelarangan IPS di lingkungan sekitar fasilitas Pendidikan (sekolah dan madrasah)? (Lampirkan data dukung berupa foto KTR di Fasilitas Pendidikan dan data perbandingan jumlah keseluruhan pendidikan dengan fasilitas Pendidikan yang sudah menerapkan KTR). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan pada tahun sebelumnya!

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.50

Jawaban:

☐ (a) 76 % - 100%

☐ (b) 51 % - 75%

☐ (c) 26% - 50%

☒ (d) kurang dari 25%

☐ (e) Belum ada

Catatan:

penerapan KTR di Fasilitas Pendidikan baru Dalam Bentuk sosialisasi, penyerahan media KIE

5. Berapa Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas tempat umum (seperti Ruang Bermain Anak, tempat rekreasi, tempat ibadah, Pelabuhan, Terminal, Stasiun, Bandara, Mall, toilet umum, tempat parkir umum, transportasi publik, halte, hotel, aula, dsb)? (Lampirkan data dukung berupa foto KTR di Fasilitas Umum dan data perbandingan jumlah keseluruhan dengan fasilitas umum yang sudah menerapkan KTR). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas tempat umum pada tahun sebelumnya!

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76 % - 100%
☐ (b) 51 % - 75%
☒ (c) 26% - 50%
☐ (d) kurang dari 25%
☐ (e) Belum ada

Catatan:

secara umum belum di lakukan penyediaan kawasan tanpa rokok di fasilitas tempat umum, namun beberapa lokasi seperti tempat rekreasi (Taman Cinta , pondok poteng dan kantin pekong) di wilayah UPT. Puskesmas Singkawang Timur 1 telah dilakukan sosialisasi KTR namun tidak ada dokumen yang bisa di sampaikan .

6. Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)
Sebutkan perannya dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok!

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan lembaganya!

- ☐ (a) Satpol PP
☐ (b) Tim khusus pengawas KTR
☒ Tidak

Catatan:

dalam perwako pada bagian kedua BAB Pengawasan pasal 21 ayat 2 (Tim Pengawas KTR di tetapkan dengan keputusan walikota). namun sampai dengan sekarang belum ada penetapan SK walikota tentang Tim Pengawas KTR di Kota Singkawang.

7. Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, pemasangan di mana saja?

- ☒ (a) Billboard atau baliho
☒ (b) Videotron
☐ (c) Neonbox
☒ (d) Lain-lain, sebutkan di catatan!
☐ Tidak

Catatan:

pemerintah kota singkawang masih menerima pemasangan iklan promosi dan sponsor rokok melalui OPD terkait.

8. Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, di acara apa saja?

- ☐ (a) Pendidikan
- ☐ (b) Olah raga
- ☐ (c) Musik
- ☐ (d) Pelatihan atau workshop
- ☐ (e) Lain-lain, sebutkan di catatan!

☒ Tidak

Catatan:

9. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

- ☒ (a) Peraturan Bupati/ Walikota
- ☐ (b) Keputusan Bupati/ Walikota
- ☐ (c) Instruksi Bupati/ Walikota
- ☐ (d) Surat Edaran Bupati/ Walikota

☐ Tidak

Catatan:

10. Seberapa luas cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

Ya

- ☒ (a) Hanya di kawasan tanpa rokok saja
- ☐ (b) Hanya di jalan utama atau protokol
- ☐ (c) di seluruh wilayah

Tidak

Jika Tidak, jelaskan mengapa?

- ☐ (a) Sudah ada kebijakan dari K/L terkait
- ☐ (b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur
- ☐ (c) Belum ada komitmen

Catatan:

11. Apakah ada event anak/remaja (misalnya musik, olahraga, seni, kegiatan komunitas dan sebagainya), baik online maupun offline, yang disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? (Sebutkan di Catatan!)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☐ Ya
- ☒ Tidak

Catatan:

Tidak ada , dan sangat tidak mendukung hal tersebut

12. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung).

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.50

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ Ya. Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya dalam matriks!
☒ Tidak

Catatan:

13. Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tuliskan pada catatan!)
☐ Tidak

Catatan:

Pada tahun 2017 Forum Anak Kota Singkawang didampingi Dinas Sosial PPPA, SatPOL PP, Dinas Kesehatan dan KB melakukan kegiatan tolak jadi target dengan mengadvokasi warung untuk menurunkan spanduk iklan rokok, Kegiatan ini akan kembali digalakan pada tahun 2022 diawali dengan adanya koordinasi Ketua Divisi Kluster Kesehatan Dan Kesejahteraan dasar Forum Anak dengan Pejabat Eselon III pada dinas Kesehatan Dan KB terkait Isu anak dan rencana pengembangan program kerja kluster kesehatan dan kesejahteraan dasar oleh Forum Anak Kota Singkawang
https://www.instagram.com/tv/CL8ZEOLosdC/?utm_medium=copy_link isu tentang masih adanya perilaku merokok diangkat perwakilan forum anak saat musrenbang tingkat kota

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Nilai Maksimal: 110.00

18. Wajib Belajar 12 Tahun

1. Apakah ada SOP atau mekanisme penanganan anak putus sekolah? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

- Ya
☒ (a) Ada, Pemetaan faktor kasus anak putus sekolah
☒ (b) Ada, Pemberian pendampingan
☒ (c) Ada, Pemberian bantuan sesuai kebutuhan
☐ Tidak

Catatan:

Sesuai dengan Juknis PIP (Kep Dirjen Pendidikan Islam) tujuan PIP untuk Siswa Madrasah antara lain adalah membantu anak-anak dari kelompok rentan secara ekonomi untuk tetap bersekolah (mengurangi kasus anak putus sekolah).

Peran Kemenag Kota Singkawang:

1. Sosialisasi keberadaan program kepada masyarakat dan tahapan pelaksanaan program kepada madrasah;
2. Mendorong madrasah pro aktif meminta KIP, PKH, SKTM dll yg sejenis kepada siswa yg memiliki sejak PPDB dan mengunggah kartu tsb ke dalam EMIS (dapodik-nya kemenag). Tujuannya: membantu menginformasikan kpd Kemenag Pusat adanya anak tidak mampu yg mungkin blm masuk ke DTKS. Default Penerima PIP tetap DTKS. Namun data dari madrasah menjadi data suplemen pokok. Kemenag memverifikasi data dari madrasah
3. Menginformasikan data penerima PIP kepada madrasah ketika sudah ditetapkan dan memonitor progres pencairan.
4. Memastikan tidak ada pungli dlm pencairan PIP dan menerima pengaduan masyarakat terkait PIP.
5. Ikut mengevaluasi ketepatan sasaran PIP, penggunaan PIP, dan efeknya terhadap angka putus sekolah dlm bentuk laporan kepada Kemenag Pusat melalui Kanwil dan ikut pendampingi pemeriksa dlm proses evaluasi (Irjen, BPKP, maupun BPK)

2. Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)? (Lampirkan dokumen pendukung!)

Nilai Maksimal: 10.50

Nilai: 2.50

Jawaban:

Ya

Jika Ya dimana?

- ☐ (a) LPKA
- ☐ (b) LPAS
- ☐ (c) LPKS
- ☐ (d) Rumah Sakit
- ☐ (e) RPSA
- ☐ (f) Shelter Perlindungan Anak
- ☐ (g) UPTD PPPA
- ☐ (h) LPSK
- ☒ (i) Pesantren/Pendidikan Berasrama
- ☒ (j) PKBM
- ☒ (k) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

Berikut ini Informasi terkait 9 Pesantren yang ada di Singkawang
<https://www.infopesantren.com/2021/04/pesantren-di-singkawang.html?m=1>

Sekolah Agama bon pesantren berasrama yang berada dibawah naungan kemenag
https://data.sekolah-kita.net/sekolah/SDTK%20INTHEOS%20SINGKAWANG_134183
https://data.sekolah-kita.net/sekolah/SMTK%20INTHEOS%20SINGKAWANG_134204

Sekolah Berasrama Non Kemenag
<https://www.smpalgonyarumkop.sch.id/2020/08/persekolahan-katolik-nyarumkop-singkawang.html>

SMP Fillial dan SMP Terbuka

3. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!
- ☐ Tidak

Catatan:

1. Dinas Sosial PPPA
2. BPKP,
3. BPK
4. SMP Fillial
5. SMP Terbuka

4. Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tulis pada catatan)
- ☐ Tidak

Catatan:

Penerapan Program PIP, Kegiatan 1 Sekolah 1 Kearifan lokal

19. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

1. Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA atau kelembagaan terkait SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, buktikan dengan SK.
☐ Tidak

Catatan:

2. Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk PAUD/ sederajat? (Sebutkan di Matriks dan Lampirkan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 25% - 50%
☒ (d) < 25%
☐ (e) Tidak ada

Catatan:

1 TK

2. Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SD/ sederajat? (Sebutkan di Matriks dan Lampirkan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 25% - 50%
☒ (d) < 25%
☐ (e) Tidak ada

Catatan:

Total jumlah

SD 99 SRA 7

SMP 35 SRA 5

2. Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SMP/ sederajat? (Sebutkan di Matriks dan Lampirkan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 25% - 50%
☒ (d) < 25%
☐ (e) Tidak ada

Catatan:

SMP 35 SRA 5

2. Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SMA/ sederajat? (Sebutkan di Matriks dan Lampirkan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
- ☐ (b) 51% - 75%
- ☐ (c) 25% - 50%
- ☒ (d) < 25%
- ☐ (e) Tidak ada

Catatan:

SMA 15 SRA 2

3. Berapa persentase SRA yang terstandarisasi? (lampirkan data dukung berupa sertifikat standarisasi SRA dan data jumlah keseluruhan SRA dengan jumlah SRA yang sudah terstandarisasi dan lengkapi matriks)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
- ☐ (b) 51% - 75%
- ☐ (c) < 50%
- ☒ (d) Tidak ada

Catatan:

4. Berapa persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak?
Sebutkan berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun di Catatan! (Lampirkan matriks dan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta)[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.50

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
- ☐ (b) 51% - 75%
- ☐ (c) 25% - 50%
- ☒ (d) < 25%
- ☐ (e) Tidak ada

Catatan:

5. Berapa persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih tentang SRA?
Sebutkan berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun di Catatan? (Lampirkan matriks dan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.50

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
- ☐ (b) 51% - 75%
- ☐ (c) 25% - 50%
- ☒ (d) < 25%
- ☐ (e) Tidak ada

Catatan:

<https://singkawangkota.bnn.go.id/sekolah-ramah-anak/>
<https://www.suarakalbar.co.id/2019/11/kpppa-harap-singkawang-jadi-kota-layak/>

6. Apakah ada mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring SRA ketika terjadi kasus yang melibatkan anak di Satuan Pendidikan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ (a) Sudah dan melibatkan jejaring
☐ (b) Sudah, tapi belum melibatkan jejaring
☐ (c) Belum ada

Catatan:

Kasus Anak Pindah Agama dan mendapatkan hambatan dari orang tua untuk ke sekolah penanganan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Singkawang, kepala sekolah dan Tim SMPN 4 yang merupakan salah satu SRA, Lurah dan Bhabin Kamtibmas

7. Apakah terdapat pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di sekitar lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Anak termasuk pada jalur perjalanan menuju dan pulang sekolah sesuai Perda KTR? (lampirkan data dukung berupa foto dan kebijakan/peraturan)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ada
☐ Tidak ada

Catatan:

Perwako KTR
dan Perda

8. Apakah ada kampanye yang dilakukan oleh satuan Pendidikan dengan melibatkan siswa terkait kebijakan anti rokok dan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di Satuan Pendidikan Ramah Anak? (lampirkan data pendukung berupa foto atau laporan kegiatan)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ada
☐ Tidak ada

Catatan:

Pemasangan himbauan di lingkungan sekolah

9. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap SRA? (Lampirkan Dokumen Pendukung Laporan Pendampingan)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) Pendampingan khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan pendampingan
☐ (b) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain
☒ (c) Sudah, namun tidak ada laporan pendampingan
☐ (d) Belum ada

Catatan:

Pendampingan dilakukan secara daring melalui grup WA SRA sehingga informasi terkait SRA disampaikan melalui grup tersebut

10. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan SRA? (Lampirkan Matriks dan Data Pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!
☐ Tidak

Catatan:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KOTA Singkawang
Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang
Kantor Kementreian Agama Kota Singkawang
Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Singkawang

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/389609/kpppa-ri-dorong-singkawang-jadikan-semua-sekolah-ramah-anak?video=>

11. Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA? (Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan monev SRA)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☐ (a) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev
- ☐ (b) Sudah melalui pemberian penghargaan
- ☒ (c) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain
- ☐ (d) Sudah, namun tidak ada laporan monev
- ☐ (e) Belum ada

Catatan:

salah satu kegiatan pemantauan SRA <https://equator.co.id/kejar-kota-layak-anak-wujudkan-dulu-sekolah-ramah-anak-di-singawang/>

12. Berdasarkan hasil evaluasi, apakah penerapan SRA berdampak pada penurunan jumlah kekerasan di satuan pendidikan? (lampirkan dokumen pendukung berupa data kekerasan di satuan pendidikan)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) Berdampak signifikan sesuai data terlampir
- ☒ (b) Berdampak namun hanya di beberapa satuan pendidikan
- ☐ (c) Tidak ada

Catatan:

Belum tersampaikan dan bisa dibuat perbandingan di Satuan Pendidikan

13. Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? (Lampirkan dokumen pendukung jika ada)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi?

- ☒ (a) Dinas Pendidikan/Kemenag/Sub Gugus Tugas Klaster IV
- ☒ (b) Dunia Usaha dan Lembaga masyarakat
- ☒ (c) Fasilitator SRA

☐ Tidak

Catatan:

Kegiatan diliput dimedia dan Fasilitator Nasional SRA Kota Singkawang berperan aktif dalam kegiatan tersebut hal ini dapat dibaca pada link Pontianak Post berikut ini <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/singkawang/19/11/2021/sinergi-wujudkan-singkawang-kota-layak-anak/>

14. Apakah ada program inovasi pengembangan SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tulis pada catatan)
- ☐ Tidak

Catatan:

Program 7 Gerakan Sekolah Menyenangkan

Yang Wajib diterapkan pada satuan pendidikan baik jenjang SD maupun SMP

SRA SMPN 17 https://www.canva.com/design/DAE9ZA4-rgg/vo7S09aREP06QXLUd7Q4IQ/watch?utm_content=DAE9ZA4-rgg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

SRA SMPN 4 Singkawang Bank Sampah <https://www.youtube.com/watch?v=yqVfya-564o>

SRA SMPN 4 Singkawang

20. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

1. Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) tidak ada
☒ (b) 1 PKA yang di SK kan
☐ (c) 2-5 PKA yang di SK kan
☐ (d) >5 PKA yang di SK kan

Catatan:

PKA Fantasi merupakan bagian dari Forum Anak Kota Singkawang yang membidangi kegiatan kreatifitas dan pemanfaatan waktu luang anak yang bersifat rekreatif

2. Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA? (Lampirkan dokumen dan laporan pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

- ☐ (a) Dewan Pendidikan
☒ (b) Lembaga Perlindungan Anak
☒ (c) Lembaga Masyarakat
☐ Tidak

Catatan:

Kegiatan PKA disupport oleh dinas sosial pppa, sanggar ananda melalui Mami junior tuti, dan seniman lainnya tergantung tematik kegiatan kreatifitas yang dilakukan oleh anak

3. Apakah memiliki SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) atau Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA atau RIRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) Ada, berupa full bimbingan teknis dalam beberapa hari
☐ (b) Ada, berupa sosialisasi
☒ (c) Ada, kegiatan bergabung dengan kegiatan lain
☐ (d) Tidak ada

Catatan:

Pengelola PKA Fantasi Telah mengikuti E-learning KHA dan turut menjaid peserta dalam kegiatan regenerasi forum anak yang menjadikan KHA sebagai Salah satu materi wajib

4. Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang dipublikasikan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tulis pada catatan)
☐ Tidak

Catatan:

1. Pengemasan Kegiatan Evaluasi KLA yang dirangkai dengan Pengukuhan Pengurus Forum Anak, Forum Anak melakukan inisiasi sidang konvensi hak anak PBB dimana anak-anak bermain peran sebagai delegasi dari negara-negara anggota PBB
2. PKA Fantasi berinisiatif mengcover lagu kejutanku yang merupakan soundtrack dari Film Animasi Nusa, dan membuat Video Clipnya ini sudah dipublish di youtube link https://www.youtube.com/watch?v=ap_w-gwINlg
3. Pada Akhir tahun PKA Fantasi berinisiatif mengemas permainan offline dengan mengadaptasi Squid Game yang sedang naik daun pendaftaran kegiatan dilakukan secara online

5. Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ (a) tidak ada
- ☐ (b) 1 RIRA yang di SK kan
- ☐ (c) 2-5 RIRA yang di SK kan
- ☐ (d) >5 RIRA yang di SK kan

Catatan:

6. Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai juknis. (Tulis pada catatan)
- ☐ Tidak

Catatan:

7. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya pada matriks!
- ☐ Tidak

Catatan:

Sekretariat Daerah Kota Singkawang memfasilitasi Tempat Shooting Video Klip "Kejutanku" oleh divisi PKA Fantasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Fasilitasi Siaran Rapensi terkait Launching Cover Kejutanku dan Launching Kejutanku di Aula Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberi program khusus untuk anak dalam radio pendidikan yang terjadwal dalam seminggu 3 kali Bapak Wakil Walikota dan Ibu PKK memberi ruang dan perhatian dalam program peningkatan kreatifitas dan literasi anak bersama kampung dongeng di taman gayung bersambut

8. Apakah ada peran lembaga masyarakat dalam kegiatan Pusat Kreativitas Anak maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 3.50

Nilai: 3.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, sebutkan nama lembaga dan apa perannya pada matriks.
- ☐ Tidak

Catatan:

Pusat Pengembangan Anak GBI Singkawang
SQC Singkawang

9. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap PKA dan RIRA? (Lampirkan Dokumen Pendukung Laporan Pendampingan)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☐ (a) Pendampingan khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan pendampingan
- ☒ (b) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain
- ☐ (c) Sudah, namun tidak ada laporan pendampingan
- ☐ (d) Belum ada

Catatan:

Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang melakukan pendampingan pada kegiatan PKA Fantasi pada tataran perumusan konsep dan eksekusi rancangan, dalam prosesnya pendampingan teknis dibantu oleh FanXpert yaitu fasilitator alumni forum anak singkawang (Fantasi)

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Nilai Maksimal: 205.00

21A. Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus

1. Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 9.00

Nilai: 9.00

Jawaban:

Ya

- ☒ Anak dalam situasi darurat
- ☒ Anak yang berhadapan dengan hukum
- ☒ Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- ☒ Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- ☒ Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- ☒ Anak yang menjadi korban pornografi
- ☒ Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- ☒ Anak dengan HIV/AIDS
- ☒ Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- ☒ Anak korban kejahatan seksual
- ☒ Anak korban jaringan terorisme
- ☒ Anak penyandang disabilitas
- ☒ Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- ☒ Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- ☒ Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

☐ Tidak

Catatan:

2. Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 14.00

Jawaban:

Ya

- ☒ Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
- ☒ Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- ☒ Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- ☒ Kelompok: Khusus. Anak dalam situasi darurat
- ☐ Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- ☒ Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS
- ☒ Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas

☐ Tidak

Catatan:

3. PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus? Apakah ada PD lain yang berperan? Sebutkan nama dan perannya.
(Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 15.00

Nilai: 15.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa perannya?

☒ Pencegahan (Tulis pada matriks)

☒ Penanganan/Layanan (Tulis pada matriks)

☒ Penanganan: Psikososial dan Reintegrasi Sosial (Tulis pada matriks)

☐ Tidak

Catatan:

4. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Pemerintah? Apabila ada, lampirkan dasar hukum (apabila ada) dan bagaimana mekanisme layanannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 6.00

Nilai: 6.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola Pemerintah? Sebutkan nama Lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

☒ 6 lembaga layanan atau lebih

☐ 5 lembaga layanan

☐ 4 lembaga layanan

☐ 3 lembaga layanan

☐ 2 lembaga layanan

☐ 1 lembaga layanan

☐ Tidak

Catatan:

UPPA Polres Singkawang

Satlantas Polres Singkawang

Bapas Singkawang

Lapas IIB Singkawang

Kejaksaan Negeri Singkawang

Pengadilan Negeri Singkawang

Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang

ULD Kota Singkawang

Klinik Mawar

4. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Masyarakat? Apabila ada, lampirkan dasar hukum (apabila ada) dan bagaimana mekanisme layanannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola Masyarakat? Sebutkan nama Lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

☒ 2 lembaga layanan atau lebih

☐ 1 lembaga layanan

☐ Tidak

Catatan:

Panti Asuhan Yasti, Panti Asuhan Al Maarif dan Panti Asuhan Abigael Sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Singkawang Khususnya Dinas Sosial PPPA dalam Penanganan AMPK sejak tahun 2015

5. Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll) (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 8.00

Nilai: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Berapa jumlahnya? Sebutkan Sarana dan Prasarananya pada matriks.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☒ 8 atau lebih

☐ Tidak

Catatan:

1. Telepon pengaduan melalui WA Sapa (telepon) link bit.ly/dinsospppaskw
2. Perahu untuk evakuasi korban Bencana milik Dinsos PPPA, BPBD Kota Singkawang dan Tagana Singkawang
3. Mobil Rescue Milik Dinsos PPPA dan BPBD
4. Mobil Pick Up untuk Operasional milik Dinsos PPPA
5. Shelter milik Dinsos PPPA
6. Mesin chainsaw milik BPBD Singkawang
7. Motor milik BPBD Singkawang
8. Mesin Pompa Apung
9. Alat Padam Portable
10. Mesin Pemadam
11. Mesin Pompa Karhutla
12. Handy Talky
13. SSB Radio
14. RIG Radio
15. APAR
16. Flexible Tanx 1500 galon
17. Mobil tanki Air
18. dll.....
8. Mesin

6. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 8.00

Nilai: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, di kelompok dan kategori apa saja?

☒ Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum

☒ Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban kekerasan dan eksploitasi

☒ Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

☒ Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi

☒ Kelompok: Kekerasan. Pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dalam BPTA

☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan

☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual

☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme

☒ Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

☒ Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

☒ Kelompok: Khusus. Anak korban bencana dan konflik

☒ Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

☒ Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS

☒ Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas

☐ Tidak

Catatan:

1. Kerjasama dengan LKSA / Panti asuhan
2. Layanan Pengaduan Perlindungan untuk Anak (SAPA/ Sahabat Perempuan dan Anak Singkawang) link SaPA bit.ly/dinsospppaskw youtube SaPA Singkawang <https://www.youtube.com/watch?v=QgTBB3tiAQc&t=19s>
3. Pendampingan Pembuatan Buku Pada Kluster Perlindungan Khusus Forum Anak Singkawang
4. Program Tagana Masuk Sekolah
5. Seri PKA di Panti link <https://www.youtube.com/watch?v=tfyvdpQ2Dw>

7. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan.

Apakah lembaga penyedia layanan PD sudah sesuai dengan standar ramah anak? (mandat Pasal 3, PP 78/2021)

(Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 6.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, untuk lembaga pemerintah, berapa jumlahnya? Tuliskan pada matriks.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4 atau lebih

☒ Tidak

Catatan:

7. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan.

Apakah lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak? (mandat Pasal 3, PP 78/2021)

(Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, untuk lembaga masyarakat, berapa jumlahnya? (Tuliskan pada matriks)

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4 atau lebih

☒ Tidak

Catatan:

8. Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiatry, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, Ada berapa SDM? (Tuliskan SDM, jumlah, dan jenis pelatihan pada matriks)

☐ 1 SDM

☐ 2 SDM

☐ 3 SDM

☒ 4 SDM

☐ 5 SDM

☐ 6 SDM

☐ 7 SDM

☐ 8 SDM

☐ 9 SDM

☐ 10 SDM atau lebih

☐ Tidak

Catatan:

21B. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

1. Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 9.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut.

- ☒ (a) anak yang melaporkan
- ☒ (b) anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara
- ☐ (c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
- ☐ (d) anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)
- ☐ (e) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
- ☒ (f) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
- ☐ (g) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
- ☒ (h) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
- ☐ (i) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

☐ Tidak

Catatan:

2. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 8.00

Nilai: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah PD yang bermitra? (Tuliskan nama PD dan peranannya pada matriks)

- ☐ 1 PD
- ☐ 2 PD
- ☐ 3 PD
- ☐ 4 PD
- ☐ 5 PD
- ☐ 6 PD
- ☐ 7 PD
- ☒ 8 PD atau lebih

☐ Tidak

Catatan:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang
Kantor Kemenag Kota Singkawang
RSUD dr Abdul Aziz
RSJ Provinsi Kalimantan Barat
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang
Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
Polres Kota Singkawang
Pengadilan Agama Kota Singkawang
Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat
Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bengkayang
Dinas PPPA Kabupaten Mempawah
Dinas PPPA dan KB Kota Pontianak
Dinas PPPA Kabupaten Sambas

bentuk partisipasi memberi materi perlindungan anak pada saat mos smp <https://www.youtube.com/watch?v=GhjrttyA6mY&t=17s>

21C. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

1. Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 9.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada catatan dengan format tersebut!

- ☐ (a) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
- ☐ (b) anak yang mendapatkan layanan pendidikan
- ☐ (c) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
- ☐ (d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
- ☐ (e) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
- ☐ (f) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
- ☐ (g) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

☒ Tidak

Catatan:

Jumlah pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk yang mendapatkan layanan:

- (a) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan
- (b) anak yang mendapatkan layanan pendidikan
- (c) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
- (d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum
- (e) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga
- (f) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif
- (g) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

2. Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ Ya. Jika ya, bagaimana SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (Lampirkan dokumen pelaksanaan)
- ☒ Tidak

Catatan:

3. Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ Ya. Jika ya, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan terhadap pekerja anak? (Lampirkan dokumen pelaksanaan).
- ☒ Tidak

Catatan:

4. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, lembaga apa yang melakukan?

- ☐ (a) Pengawasan Tenaga Kerja
- ☐ (b) Dinas Tenaga Kerja
- ☐ (c) Dinas Sosial
- ☒ (d) Dinas PPPA
- ☐ (e) LSM Peduli Anak
- ☐ (f) Lainnya

☐ Tidak

Catatan:

tahun 2020-2021 tidak ada pengaduan kasus pekerja anak ke dinas sosial PPPA, tahun 2022 ada 1 pelaporan tentang pekerja anak

5. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 8.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah PD yang bermitra? (Tuliskan nama PD dan peranannya pada matriks)

☐ 1 PD

☐ 2 PD

☐ 3 PD

☐ 4 PD

☐ 5 PD

☐ 6 PD

☐ 7 PD

☐ 8 PD atau lebih

☒ Tidak

Catatan:

22A. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

1. Apakah anak korban Pornografi mendapatkan layanan? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 9.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut

☒ (a) anak yang melaporkan

☐ (b) anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara

☐ (c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

☐ (d) anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)

☐ (e) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

☒ (f) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

☐ (g) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga

☐ (h) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

☐ (i) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

☐ Tidak

Catatan:

Pornografi yang melapor 1 orang dan difasilitasi melapor ke polres

2. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 8.00

Nilai: 5.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah PD yang bermitra? (Tuliskan nama PD dan peranannya pada matriks)

☐ 1 PD

☐ 2 PD

☐ 3 PD

☐ 4 PD

☒ 5 PD

☐ 6 PD

☐ 7 PD

☐ 8 PD atau lebih

☐ Tidak

Catatan:

Dinas Sosial PPPA
Dinas Kesehatan dan KB
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BNN Kota Singkawang
RSUD dr. Abdul Aziz

22B. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

1. Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 9.00

Nilai: 8.25

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa banyak fasilitas yang diberikan dan apa bentuknya? (Tuliskan bentuk fasilitas pada matriks)

- ☒ (a) Form pendataan
- ☒ (b) mekanisme koordinasi
- ☒ (c) kelompok relawan peduli anak
- ☒ (d) Shelter yang aman
- ☒ (e) Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak
- ☒ (f) Toilet yang aman/ sesuai usia anak
- ☒ (g) Makanan yang sesuai usia anak
- ☒ (h) Pengisian waktu luang bagi anak
- ☒ (i) Ketersediaan fasilitas belajar
- ☒ (j) Layanan Psikososial / penguatan motivasi
- ☒ (k) pemenuhan kebutuhan spesifik anak
- ☐ (l) Fasilitas belajar
- ☐ (m) Lainnya, Sebutkan pada matriks!

☐ Tidak

Catatan:

2. Apakah tersedia early warning system bencana yang dipahami anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 0.50

Nilai: 0.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, Laporkan bentuk dan pelaksanaan early warning system bencana pada catatan/lampiran
- ☐ Tidak

Catatan:

Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Kelurahan Tangguh Bencana

3. Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 0.50

Nilai: 0.50

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, Laporkan simulasi penggunaan jalur evakuasi ramah anak pada catatan/lampiran.
- ☐ Tidak

Catatan:

4. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 8.00

Nilai: 8.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah PD yang bermitra? (Tuliskan nama PD dan peranannya pada matriks)

☐ 1 PD

☐ 2 PD

☐ 3 PD

☐ 4 PD

☐ 5 PD

☐ 6 PD

☐ 7 PD

☒ 8 PD atau lebih

☐ Tidak

Catatan:

Kegiatan Tagana MASuk Sekolah Link You tube <http://youtu.be/rgLKRgkfJLY>.

Dinas Sosial PPPA bekerjasama dg TAGANA Kota Singkawang dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan melalui Sekolah (SMPN3, SMP YASTi dan SMPN 8) melakukan sosialisasi pencegahan bencana kepada Siswa

23A. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

1. Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.)

Nilai Maksimal: 8.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas apa saja? (Tulis pada catatan dan lampirkan dokumen dan foto pendukung!)

☐ 1 lembaga

☐ 2 lembaga

☐ 3 lembaga

☒ 4 lembaga

☐ 5 lembaga

☐ 6 lembaga

☐ 7 lembaga

☐ 8 lembaga atau lebih

☐ Tidak

Catatan:

Beberapa lembaga layanan untuk anak disabilitas: (Minimal ada 8 lembaga untuk mendapat nilai maksimal). Lampirkan dokumen dan foto pendukungnya)

(a) Anak disabilitas penglihatan 1

(b) Anak disabilitas pendengaran 2

(c) Anak disabilitas intelektual 3

(d) Anak disabilitas fisik 2

(e) Anak disabilitas sosial 3

<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/3005fe09-30f5-e011-8290-4d20c46926e9>

<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/5012fe09-30f5-e011-b9e9-099f13903602>

<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/f0cddf09-30f5-e011-9e7f-19ea3cdf74ce>

<https://slbnsingawang.sch.id/kegiatan-di-sekolah-3/>

(f) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif

(g) Anak dengan gangguan spektrum autisme

(h) Anak dengan gangguan ganda

(i) Anak lamban belajar

(j) Anak dengan kesulitan belajar khusus

(k) Anak dengan gangguan komunikasi & wicara

(l) Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa

2. Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 1.50

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah?

- ☐ (a) Pendataan dan pemutakhiran data
- ☒ (b) Sosialisasi
- ☐ (c) Pelatihan orang tua anak disabilitas
- ☐ (d) Bantuan keuangan
- ☒ (e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas
- ☒ (f) Bantuan peralatan/ sarana prasarana

☐ Tidak

Catatan:

Dinas Sosial PPPA menitipkan beberapa anak AMPK pada beberapa panti asuhan salah satunya abigael, ada dua orang anak yang menunjukkan perilaku yang berbeda yang menonjol dengan teman-teman yang lain untuk itu pada tahun 2020 dilakukan rapat dengan pihak terkait yaitu pihak panti, pkbm, aktifis seni untuk merancang kegiatan yang memudahkan anak yang berbeda tadi dapat meningkatkan kemampuan sekaligus membangun pergaulan yang inklusif melalui kegiatan 3 sesi yang melibatkan forum anak, kegiatan bersifat situasional tergantung adanya keluhan dan kasus yang diadakan disesuaikan dengan sumberdaya yang ada pada dinas sosial pppa kota singkawang

Link dokumentasi Kegiatan : <https://www.youtube.com/watch?v=tfyvdpQ2Dw>

3. Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

- ☐ (a) Transportasi
- ☒ (b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah
- ☒ (c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah
- ☒ (d) Fasilitas dan desain bangunan publik
- ☐ (e) Sarana dan prasarana pariwisata

☐ Tidak

Catatan:

4. Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 1.50

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya? (Bila ada bentuk lainnya bisa disebutkan di catatan)

- ☒ (a) Melibatkan dalam Forum Anak
- ☒ (b) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas
- ☐ (c) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi
- ☒ (d) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas
- ☐ (e) Lainnya. Sebutkan pada catatan!

☐ Tidak

Catatan:

PKA Fantasi berinisiatif mengcover lagu kejutanku yang merupakan soundtrack dari Film Animasi Nusa, dan membuat Video Clipnya ini sudah dipublish di youtube link https://www.youtube.com/watch?v=ap_w-gwINlg yang melibatkan anak Tuna wicara dan anak berkebutuhan khusus dalam pembuatan clipnya

5. Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin?

- ☐ (a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas
☒ (b) Ada akses pendidikan
☐ (c) Ada jaminan kesehatan
☐ (d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa
☐ (e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua

☐ Tidak

Catatan:

Link Video Penjangkauan Siswa oleh Guru SRA SMPN 17 https://www.canva.com/design/DAE9ZA4-rgg/vo7S09aREP06QXLUd7Q4IQ/watch?utm_content=DAE9ZA4-rgg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

23B. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

1. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, Lampirkan laporan pelaksanaan sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)
☐ Tidak

Catatan:

2. Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 3.00

Jawaban:

- ☒ Ya. Jika Ya, apa bentuknya? Laporkan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)
☐ Tidak

Catatan:

LEmbaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "PELANGI" Kota Singkawang

24A. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)

1. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ada datanya. anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)
☐ Tidak ada data

Catatan:

Ada 3 anak yang di diversi di tingkat penyidikan tahun 2020
Ada 2 anak yang di diversi di tingkat penyidikan tahun 2021

2. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ Ada datanya. anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)
☐ Tidak ada data

Catatan:

tidak diversi ditingkat penuntutan tahun 2020 dan 2021

3. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di pemeriksaan perkara Anak di pengadilan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ Ada datanya. anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)
☐ Tidak ada data

Catatan:

tidak ada diversi ditingkat pengadilan tahun 2020 dan 2021

4. Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa:

- (a) Proses Penyidikan
(b) Proses Penuntutan
(c) Proses Penjalanan Hukum

Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya LPKS?

(Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Nilai Maksimal: 1.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☒ Tidak ada, lampirkan data dan dokumen yang menunjukkan keberadaan LPKS yang memadai
☐ Masih ada, dan ada upaya
☐ Masih ada, dan tidak ada upaya

Catatan:

5. Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ada datanya. anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)
☐ Tidak ada data

Catatan:

tahun 2020 = 1 orang

tahun 2021 = 1 orang

6. Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk anak penyandang disabilitas)? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ Ada datanya. anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)
☐ Tidak ada data

Catatan:

tahun 2021 berjumlah 5 orang

24B. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait

dengan Kondisi Orang Tuanya

1. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notulensi, rekomendasi, dll dan bentuk kegiatannya)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya
☐ Tidak

Catatan:

Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Pasal 55

2. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 3.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuknya? (Bentuk lainnya, bisa ditulis di catatan)

- ☐ (a) Memperkuat pendidikan Pancasila
☒ (b) Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan
☒ (c) Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif
☒ (d) Lainnya. Sebutkan pada catatan!

☐ Tidak

Catatan:

-menciptakan lingkungan inklusi melalui forum anak kota singkawang (binaan Dinas Sosial PPPA KOTA Singkawang) sebagai pelopor lintas ras, lintas agama, lintas kemampuan menciptakan iklim kolaborasi sehingga diharapkan membuka eksklusifitas golongan, membuka ruang saling mengenal dan menurunkan stigma pada golongan tertentu akibat prasangka contoh kegiatan cover lagu Kejutanku link https://www.youtube.com/watch?v=ap_w-gwINlg begitu juga dengan kegiatan di forum anak lainnya.

3. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? (Lampirkan dokumen pendukung termasuk jika pernah menangani dapat disampaikan data dukungannya)

Nilai Maksimal: 2.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☒ Ya
☐ Tidak

Catatan:

Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 59

KECAMATAN/DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Nilai Maksimal: 100.00

25. Kecamatan Layak Anak (KELANA)

1. Berapa jumlah Kecamatan di kabupaten/kota? Apakah ada datanya?

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ Ada data. kecamatan
☐ Tidak ada data

Catatan:

Jumlah kecamatan : 5 kecamatan (Kecamatan Singkawang Tengah , Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Timur, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Selatan)

2. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan? Uraikan dalam matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 1.25

Nilai: 1.25

Jawaban:

- ☒ (a) 81% - 100%
☐ (b) 61% - 80%
☐ (c) 41% - 60%
☐ (d) 21% - 40%
☐ (e) 1% - 20%
☐ (f) 0

Catatan:

Jumlah 4 kecamatan.

3. Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.25

Nilai: 0.75

Jawaban:

- ☐ (a) 81% - 100%
☐ (b) 61% - 80%
☒ (c) 41% - 60%
☐ (d) 21% - 40%
☐ (e) 1% - 20%
☐ (f) 0

Catatan:

Jumlah kecamatan.

4. Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 26% - 50%
☐ (d) 1% - 25%
☒ (e) 0

Catatan:

- (a). ... kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan.
Dalam bentuk apa? (Lampirkan dokumen pendukung)
(b). ... kecamatan yang memiliki mekanisme respon cepat
Dalam bentuk apa?(Lampirkan dokumen pendukung)

5. Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.25

Nilai: 1.25

Jawaban:

- ☒ (a) 81% - 100%
☐ (b) 61% - 80%
☐ (c) 41% - 60%
☐ (d) 21% - 40%
☐ (e) 1% - 20%
☐ (f) 0

Catatan:

Jumlah 5 kecamatan.
Singkawang Barat 41%- 60%
Singkawang Tengah 61% -100 %
Singkawang Selatan 61%-80%
Singkawang Timur%
Singkawang Utara 61%-85%

6. Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak? Uraikan pada matriks. (Lampirkan data dari Kemenag dan Dukcapil)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 25% - 50%
☒ (d) 1% - 25%
☐ (e) 0

Catatan:

KOTA SINGKAWANG TERDIRI DARI 5 KECAMATAN:
1. KEC. SINGKAWANG TENGAH
2. KEC. SINGKAWANG BARAT
3. KEC. SINGKAWANG SELATAN
4. KEC. SINGKAWANG TIMUR
5. KEC. SINGKAWANG UTARA

7. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 0.50

Nilai: 0.20

Jawaban:

- ☐ 0%
☐ 1% - 25%
☒ 25% - 50%
☐ 50% - 75%
☐ 75% - 99%
☐ 100%

Catatan:

Jumlah. ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi buruk.

7. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 0.50

Nilai: 0.20

Jawaban:

- ☐ 0%
☐ 1% - 25%
☒ 25% - 50%
☐ 50% - 75%
☐ 75% - 99%
☐ 100%

Catatan:

Jumlah ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi kurang

7. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 0.50

Nilai: 0.20

Jawaban:

- ☐ 0%
☐ 1% - 25%
☒ 25% - 50%
☐ 50% - 75%
☐ 75% - 99%
☐ 100%

Catatan:

Jumlah.....kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi lebih

7. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 0.50

Nilai: 0.10

Jawaban:

- ☐ 0%
☒ 1% - 25%
☐ 25% - 50%
☐ 50% - 75%
☐ 75% - 99%
☐ 100%

Catatan:

Jumlah ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan stunting

8. Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? Uraikan pada matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 1.25

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 81% - 100%
☒ (b) 61% - 80%
☐ (c) 41% - 60%
☐ (d) 21% - 40%
☐ (e) 1% - 20%
☐ (f) 0

Catatan:

Jumlah.....kecamatan

9. Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.25

Nilai: 1.25

Jawaban:

- ☒ (a) 81% - 100%
☐ (b) 61% - 80%
☐ (c) 41% - 60%
☐ (d) 21% - 40%
☐ (e) 1% - 20%
☐ (f) 0

Catatan:

- KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH
- KECAMATAN SINGKAWANG UTARA

10. Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.25

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) 81% - 100%
- ☐ (b) 61% - 80%
- ☐ (c) 41% - 60%
- ☐ (d) 21% - 40%
- ☐ (e) 1% - 20%
- ☒ (f) 0

Catatan:

Jumlah kecamatan

11. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.25

Nilai: 1.25

Jawaban:

- ☒ (a) 81% - 100%
- ☐ (b) 61% - 80%
- ☐ (c) 41% - 60%
- ☐ (d) 21% - 40%
- ☐ (e) 1% - 20%
- ☐ (f) 0

Catatan:

Jumlah.....kecamatan

12. Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.25

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) 81% - 100%
- ☐ (b) 61% - 80%
- ☐ (c) 41% - 60%
- ☐ (d) 21% - 40%
- ☐ (e) 1% - 20%
- ☒ (f) 0

Catatan:

Jumlah.....kecamatan

13. Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai indikator)

Nilai Maksimal: 1.00

Nilai: 0.75

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
- ☒ (b) 51% - 75%
- ☐ (c) 26% - 50%
- ☐ (d) 1% - 25%
- ☐ (e) 0

Catatan:

Jumlah.....kecamatan

26. Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)

1. Berapa jumlah desa dan jumlah kelurahan di kabupaten/kota? Apakah ada datanya?

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☒ [X] Ada data. Tuliskan pada catatan!
☐ [] Tidak ada data

Catatan:

Jumlah 26 kelurahan

2. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 6.00

Nilai: 1.50

Jawaban:

- ☐ [] (a) 76% - 100%
☐ [] (b) 51% - 75%
☐ [] (c) 26% - 50%
☒ [X] (d) 1% - 25%
☐ [] (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa
Kelurahan Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa 1
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan 1
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

3. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah.

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ [] (a) 76% - 100%
☐ [] (b) 51% - 75%
☐ [] (c) 26% - 50%
☐ [] (d) 1% - 25%
☒ [X] (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

4. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan? Uraikan dalam matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 26% - 50%
☒ (d) 1% - 25%
☐ (e) 0

Catatan:

Jumlahdesa
Jumlah.....kelurahan

5. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 26% - 50%
☒ (d) 1% - 25%
☐ (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani 1
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban 1
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

6. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

- ☒ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 26% - 50%
☐ (d) 1% - 25%
☐ (e) 0

Catatan:

Jumlah 26 kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

7. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? Uraikan pada matriks. (Lampirkan data dari kemenag dan Dukcapil)
[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 6.00

Nilai: 6.00

Jawaban:

- ☒ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 26% - 50%
☐ (d) 1% - 25%
☐ (e) 0

Catatan:

KOTA SINGKAWANG TERDIRI DARI 5 KECAMATAN DAN 26 KELURAHAN

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa
Kelurahan Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

8. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 0.30

Jawaban:

- ☐ 0%
☒ 1% - 25%
☐ 25% - 50%
☐ 50% - 75%
☐ 75% - 99%
☐ 100%

Catatan:

Jumlah ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi buruk.

8. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 0.60

Jawaban:

- ☐ 0%
☐ 1% - 25%
☒ 25% - 50%
☐ 50% - 75%
☐ 75% - 99%
☐ 100%

Catatan:

Jumlah ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi kurang

8. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 0.60

Jawaban:

- ☐ 0%
- ☐ 1% - 25%
- ☒ 25% - 50%
- ☐ 50% - 75%
- ☐ 75% - 99%
- ☐ 100%

Catatan:

Jumlah desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi lebih

8. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 1.50

Nilai: 0.60

Jawaban:

- ☐ 0%
- ☐ 1% - 25%
- ☒ 25% - 50%
- ☐ 50% - 75%
- ☐ 75% - 99%
- ☐ 100%

Catatan:

Jumlah desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan stunting

9. Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? Uraikan pada matriks. (Lampirkan dokumen pendukung)

[download-ini](#)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
- ☒ (b) 51% - 75%
- ☐ (c) 26% - 50%
- ☐ (d) 1% - 25%
- ☐ (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

10. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

- ☒ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 26% - 50%
☐ (d) 1% - 25%
☐ (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

11. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 6.00

Nilai: 1.50

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 26% - 50%
☒ (d) 1% - 25%
☐ (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa

Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala

Kelurahan Pasiran

Kelurahan Melayu

Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang

Kelurahan Sagatani

Kelurahan Sedau

Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu

Kelurahan Condong

Kelurahan Jawa Roban

Kelurahan Sekip Lama

Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa

Kelurahan Maya Sopa

Kelurahan Nyarumkop

Kelurahan Pajintan

Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram

Kelurahan Semelagi Kecil

Kelurahan Setapuk Besar

Kelurahan Setapuk Kecil

Kelurahan Sungai Bulan

Kelurahan Sungai Garam Hilir

Kelurahan Sungai Rasau

12. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 4.00

Jawaban:

☒ (a) 76% - 100%

☐ (b) 51% - 75%

☐ (c) 26% - 50%

☐ (d) 1% - 25%

☐ (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

13. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 5.00

Nilai: 1.00

Jawaban:

- ☐ (a) 81% - 100%
☐ (b) 61% - 80%
☐ (c) 41% - 60%
☐ (d) 21% - 40%
☒ (e) 1% - 20%
☐ (f) 0

Catatan:

Jumlah 26 kelurahan jumlah Paud HI 5 persentase

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

14. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☒ (c) 26% - 50%
☐ (d) 1% - 25%
☐ (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

15. Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen pendukung) dan Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM/sejenisnya pada Catatan!

Nilai Maksimal: 10.00

Nilai: 2.00

Jawaban:

- ☐ (a) 81% - 100%
☐ (b) 61% - 80%
☐ (c) 41% - 60%
☐ (d) 21% - 40%
☒ (e) 1% - 20%
☐ (f) 0

Catatan:

Jumlah 0 desa
Jumlah 26 kelurahan

2 kelurahan kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen pendukung) dan Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM/sejenisnya

Kelurahan Sedau 1. PATBM dan IBM
Kelurahan Sungai Garam Hilir 1 Kelurahan Bersinar

16. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

- ☐ (a) 76% - 100%
☐ (b) 51% - 75%
☐ (c) 26% - 50%
☐ (d) 1% - 25%
☒ (e) 0

Catatan:

Jumlah.....desa
Jumlah.....kelurahan

Kelurahan Kuala
Kelurahan Pasiran
Kelurahan Melayu
Kelurahan Tengah

Kelurahan Pangmilang
Kelurahan Sagatani
Kelurahan Sedau
Kelurahan Sijangkung

Kelurahan Bukit Batu
Kelurahan Condong
Kelurahan Jawa Roban
Kelurahan Sekip Lama
Kelurahan Sungai Wie

Kelurahan Bagak Sahwa
Kelurahan Maya Sopa
Kelurahan Nyarumkop
Kelurahan Pajintan
Kelurahan Sanggau Kulor

Kelurahan Naram
Kelurahan Semelagi Kecil
Kelurahan Setapuk Besar
Kelurahan Setapuk Kecil
Kelurahan Sungai Bulan
Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kelurahan Sungai Rasau

17. Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?

Nilai Maksimal: 0.00

Nilai: 0.00

Jawaban:

☐ Ya
☒ Tidak

Catatan:

18. Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Nilai Maksimal: 4.00

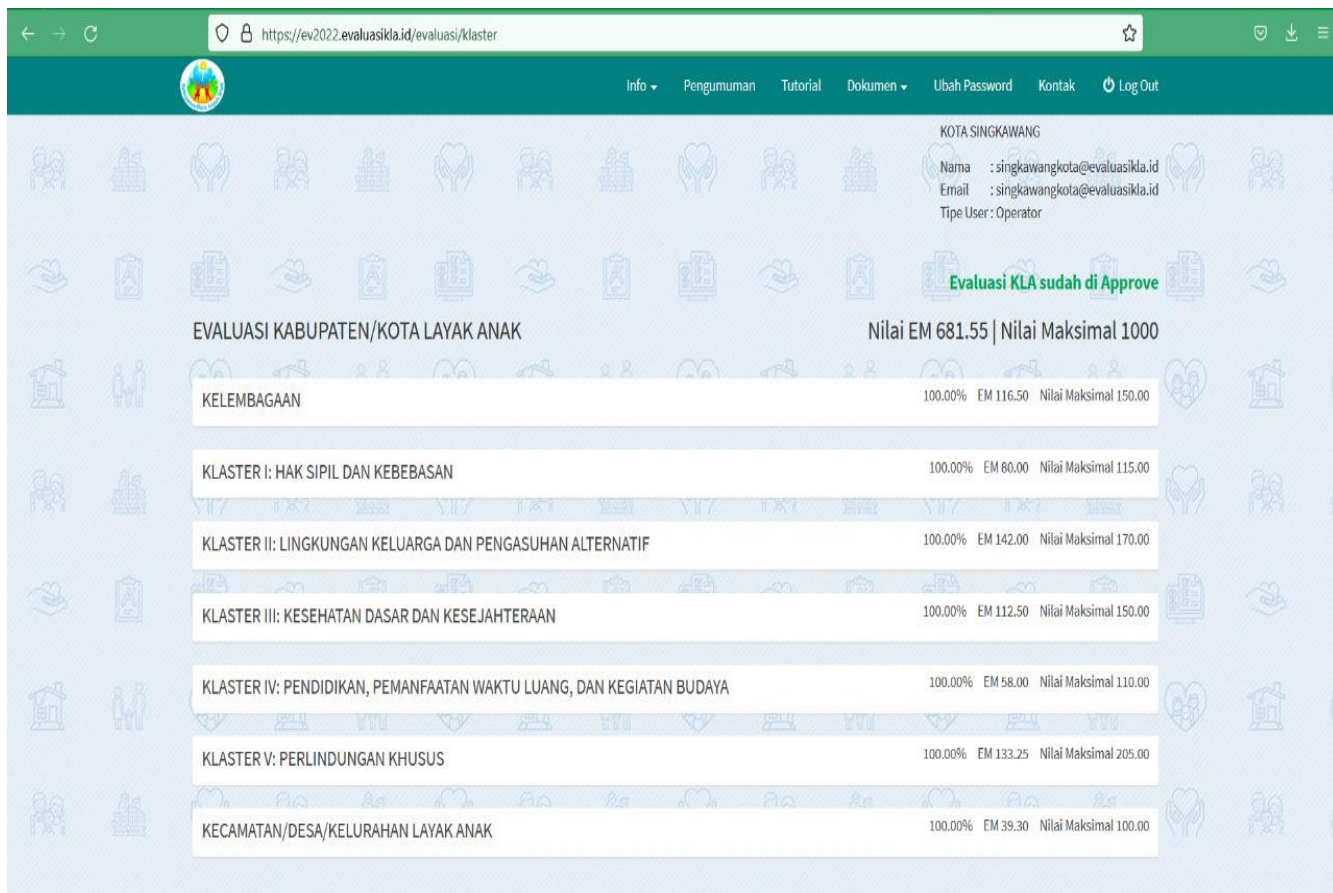
Nilai: 0.00

Jawaban:

☐ Ya
☒ Tidak

Catatan:

SKOR PENILAIAN KOTA LAYAK ANAK KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022



The screenshot shows the 'Evaluasi KLA' (KLA Evaluation) page for Singkawang. The page header includes the URL 'https://ev2022.evaluasika.id/evaluasi/klaster' and navigation links like 'Info', 'Pengumuman', 'Tutorial', 'Dokumen', 'Ubah Password', 'Kontak', and 'Log Out'. The user is logged in as 'singkawangkota@evaluasika.id' with the role of 'Operator'. A green banner states 'Evaluasi KLA sudah di Approve'.

The main content displays the 'EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK' results. The overall score is 'Nilai EM 681.55 | Nilai Maksimal 1000'. Below this, a table lists the scores for various clusters and the district level.

Kategori	Progres	Nilai EM	Nilai Maksimal
KELEMBAGAAN	100.00%	EM 116.50	Nilai Maksimal 150.00
KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	100.00%	EM 80.00	Nilai Maksimal 115.00
KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	100.00%	EM 142.00	Nilai Maksimal 170.00
KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	100.00%	EM 112.50	Nilai Maksimal 150.00
KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	100.00%	EM 58.00	Nilai Maksimal 110.00
KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS	100.00%	EM 133.25	Nilai Maksimal 205.00
KECAMATAN/DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK	100.00%	EM 39.30	Nilai Maksimal 100.00



Skor Total	2017 (Final)		2018 (Final)		2019 (Final)		2020 (Final)	2021 (Final)		2022 (Final)		KETERANGAN
	135	1000	398.4	1000	556.9	1000		1000	533.8	1000	681.05	1000
Kelembagaan	48	150	55	150	74	100	100	80	100	116.5	150	Sudah ada perda perlindungan perempuan dan anak serta SK Gugus Tugas KLA
Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan	56	140	64	135	75.5	125	125	93.5	125	80	115	Konsistensi partisipasi anak dalam musrenbang kecamatan, Akte Kelahiran dan KIA dan Informasi layak anak baik dari Kominfo dan Perpustakaan
Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	31	175	65.5	205	88.75	180	180	64.25	180	142	115	PAUD HI masih rendah, tahun 2021 sudah di bentuk, Panti Asuhan sudah diakreditasi, Ruang terbuka ramah anak belum distandarisasi
Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	0	195	77.5	185	80.2	150	150	59.3	150	112	170	Sudah ada perwako KTR, Tahun 2020 Kegiatan Kesehatan fokus pada penanganan covid 19
Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	0	135	47.5	110	84.5	130	130	72	130	58	150	Terdapat 21 SRA, tahun 2021 bertambah 1 sekolah mengajukan diri sebagai kla
Klaster 5 : Perlindungan Khusus	0	205	88.85	215	103.8	215	215	106.1	215	133.25	205	Terbatasnya fasilitas rujukan penanganan AMPK dan masih adanya kecenderungan penanganan AMPK secara parsial
Kelana/Dakela : Kecamatan /Desa/Kelurahan Layak Anak	-		-		49	100	100	58.65	100	39.3	100	Skor masih rendah pada Dakela, KLA baru menyentuh Kecamatan

DOKUMENTASI KEGIATAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) TAHUN 2022

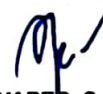


LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA SEMESTER II
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase Penanganan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS di Kota Singkawang}} \times 100\%$	70,00%	$\frac{70.927}{73.748} \times 100\% = 96,17\%$	137%
2.	Meningkatnya Kompetensi Perempuan Pada Sektor Ekonomi	Persentase Perempuan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	$\frac{\text{Jumlah perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi}}{\text{Jumlah perempuan rentan di Kota Singkawang}} \times 100\%$	17,00%	$\frac{530}{5.010} \times 100\% = 10,58\%$	62,23%
3.	Meningkatnya Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Skor Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah skor penilaian pemenuhan 24 indikator KLA yang bergerak dari 0 - 1000	650	681,55	104,85%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Hasil PMPRB oleh Inspektorat	BB atau 70	CC dengan nilai 56,48	80,69%
		- Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	- Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB atau 70	B dengan nilai 60,90	87,00%

Singkawang, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS



SUTYARTO, S.ST, M.SI

Pembina TK. I

NIP. 19660514 199010 1 001